



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

DEKLARASI BERSAMA
GERAKAN RAMADAN RAMAH ANAK
JAKARTA 15 MARET 2025

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

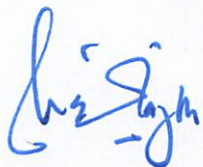
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 18 Februari 2025

Inspektur



Henry Marvin

NIP. 19700723 199103 1 001

KATA PENGANTAR

Keberhasilan sebuah bangsa ditentukan oleh sejauh mana negara hadir dalam membangun kualitas hidup manusianya secara utuh dan berkelanjutan. Di tengah dinamika global dan tantangan nasional yang semakin kompleks, Kemenko PMK menjadi garda terdepan untuk memastikan setiap kebijakan mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan visi-misi Kabinet Merah Putih, kami membawa komitmen penuh untuk mentransformasi pembangunan sosial dan budaya sebagai motor penggerak utama menuju Indonesia yang lebih mandiri, maju, dan berkeadilan.

Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru sebagai langkah awal kita dalam menindaklanjuti Rencana Strategis 2025–2029. Fokus kerja Kemenko PMK pada tahun ini telah diterjemahkan secara saksama melalui Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang menitikberatkan pada akselerasi pencapaian target-target prioritas nasional. Segala bentuk sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pemerintahan bidang PMK kami arahkan untuk menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan kemanusiaan dan kebudayaan di tengah masyarakat.

Seluruh langkah strategis yang kami tempuh senantiasa berpedoman pada Rencana Strategis Kemenko PMK 2025–2029. Hal ini menjadi kompas organisasi dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor agar tetap konsisten dan terukur. Dengan peta jalan yang jelas, Kemenko PMK berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan budaya bangsa sebagai modal sosial utama dalam menghadapi persaingan global yang kian kompetitif.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun untuk menggambarkan pencapaian serta evaluasi kinerja kami secara objektif. Dokumen ini merupakan perwujudan dari komitmen akuntabilitas dan transparansi Kemenko PMK dalam mengelola kinerja pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada hasil. Kami berharap, laporan ini dapat memberikan gambaran utuh dedikasi kami dalam mengawal pembangunan manusia dan kebudayaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi strategis untuk terus berinovasi.

Jakarta, 18 Februari 2026



PRATIKN

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas publik dalam mengawal transisi strategis menuju visi Kabinet Merah Putih dan implementasi awal Rencana Strategis 2025–2029. Sebagai kementerian koordinator, Kemenko PMK memegang mandat sesuai Perpres Nomor 144 Tahun 2024 untuk menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) guna memastikan pembangunan manusia dan kebudayaan berjalan secara terpadu dan inklusif. Fokus utama tahun ini diarahkan pada penguatan modal manusia, peningkatan efektivitas birokrasi koordinasi, serta monitoring terhadap kualitas layanan bagi kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK.

Capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan dua dari tiga indikator utama melampaui target yang ditetapkan. Indeks Kinerja SKP PMK mencapai nilai **94,78** (Target: 80) yang mencerminkan kualitas proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, serta ketajaman rekomendasi kebijakan yang sangat baik. Selain itu, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan tercapai **Sangat Memuaskan** (Target: Memuaskan), yang membuktikan tingginya kepercayaan mitra terhadap peran Kemenko PMK. Indeks Modal Manusia (IMM), saat ini masih dalam tahap finalisasi penghitungan bersama BPS dan Bappenas, namun indikator penyusunnya menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan sasaran strategis nasional yang berpotensi ketercapaian target.

Kemenko PMK menunjukkan tingkat kepatuhan dan efisiensi yang tinggi dengan realisasi anggaran mencapai **96,86%** atau sebesar Rp 174.190.081.455 dari total pagu efektif Rp 179.840.984.000. Serapan ini berbanding lurus dengan capaian kinerja yang mencapai target, meskipun terdapat kebijakan anggaran terblokir yang tidak dipergunakan sebagai bagian dari upaya efektivitas pelaksanaan kegiatan. Optimalisasi sumber daya ini membuktikan komitmen Kemenko PMK dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil guna mendukung percepatan transformasi sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

Kemenko PMK berkomitmen untuk memperkuat peran SKP yang berkelanjutan transformasi sosial melalui optimalisasi digitalisasi sistem pemantauan dan penguatan sinergi lintas sektor. Fokus kebijakan akan diarahkan pada akselerasi peningkatan kualitas keluarga, kompetensi literasi dan numerasi, penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, penguatan karakter dan budaya, serta tangguh bencana. Kemenko PMK berupaya memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan memberikan dampak yang lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud Kemenko PMK dalam menjaga kredibilitas sebagai orkestrator pembangunan manusia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
1.4 Sumber Daya Manusia.....	5
1.5 Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029	8
2.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2025 - 2029.....	10
2.3 Perjanjian Kinerja Menko PMK Tahun 2025.....	13
2.4 Rencana Aksi Menko PMK Tahun 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Pengukuran Kinerja	16
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.3 Realisasi Anggaran	93
BAB IV PENUTUP	97
4.1 Simpulan.....	97
4.2 Saran	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025	12
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025	13
Tabel 3. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2025	14
Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2025	16
Tabel 5. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1	20
Tabel 6. Target dan Capaian Prevalensi Stunting Tahun 2021-2025	26
Tabel 7. Perbandingan Statistik Kematian Menurut Kelompok Umur Dewasa di Indonesia Tahun 2020-2024	31
Tabel 8. Kategori Capaian IK SKP	34
Tabel 9. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2	35
Tabel 10. Kategori Capaian IKPK SKP	38
Tabel 11. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 3	38
Tabel 12. Capaian ECDI Nasional (2025)	74
Tabel 13. Capaian Medali Tim Indonesia pada 3 Olympic Edisi sebelumnya	78
Tabel 14. Capaian Medali Tim Indonesia pada 3 Paralympic Edisi sebelumnya	79
Tabel 15. Capaian Peringkat dan Medali Asian Games pada 3 Edisi	80
Tabel 16. Capaian Peringkat dan Medali Asian Paragames pada 3 Edisi	82
Tabel 17. Target dan Capaian Peringkat Sea Games	83
Tabel 18. Capaian Sea Games 5 tahun terakhir	83
Tabel 19. Target dan Capaian Peringkat Asean Para Games	84
Tabel 20. Capaian Asean Para Games 5 Tahun terakhir	84
Tabel 21. Capaian Nilai dimensi Budaya Literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2024	88
Tabel 22. Nilai Indikator Penyusun Budaya Literasi	88
Tabel 23. Menko PMK Meninjau Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Utara	93
Tabel 24. Realisasi Anggaran Kemenko PMK Tahun 2025	94
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja	95
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025 berdasarkan Pagu Awal dan Pagu Efektif Tahun Berjalan	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kemenko PMK Tahun 2025.....	4
Gambar 2. Data Kepegawaian Kemenko PMK Tahun 2025.....	6
Gambar 3. Grafik Tren Penurunan Angka Kematian Balita di Indonesia (1990-2020) dan Proyeksi Tahun 2025	23
Gambar 4. Grafik Tren Penurunan Prevalensi Stunting Indonesia Tahun 2013-2024 beserta Target 2025-2029.....	25
Gambar 5. Menko PMK Memantau Program Makan Bergizi Gratis di SLB Cahaya Jaya Jakarta Utara pada 13 Januari 2025	28
Gambar 6. Grafik Capaian Angka Kelahiran Total Tahun 2020 - 2025	40
Gambar 7. Grafik Capaian Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2025.....	42
Gambar 8. Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 - 2025	44
Gambar 9. Grafik Capaian IPKK Nasional per Dimensi dan Indikator.....	46
Gambar 10. Menko PMK memberikan arahan dalam acara AKSI Keluarga Indonesia.....	47
Gambar 11. Menko PMK menghadiri kegiatan Deklarasi Bersama Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Ramah Anak.....	50
Gambar 12. Menko PMK Memimpin Diskusi Interaktif Mengenai Bahasa Isyarat.....	53
Gambar 13. Tren Capaian UHH Tahun 2016-2025.....	57
Gambar 14. Menko PMK dalam Kegiatan Cek Kesehatan Gratis pada 19 Agustus 2025 bersama Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.....	59
Gambar 15. Tren Capaian dalam Membaca, Matematika, dan Sains.....	60
Gambar 16. Menko PMK Mengoordinasikan Infrastruktur Sekolah Terintegrasi.....	69
Gambar 17. Hasil AKM Literasi dan Numerasi	72
Gambar 18. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai kompetensi minimum AKM Literasi dan Numerasi	73
Gambar 19. Tren Skor Indeks ECDI (%) Tahun 2022-2025.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan investasi peradaban jangka panjang yang menempatkan pemuliaan martabat manusia sebagai pusat dari seluruh kebijakan negara. Kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing bukan hanya menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebangsaan yang luhur. Dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, penguatan ketahanan sosial, peningkatan aksesibilitas layanan dasar, serta pelestarian nilai budaya menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap warga negara mampu berkembang secara optimal sesuai dengan siklus kehidupannya.

Pembangunan manusia berfokus pada individu dan masyarakat sebagai inti serta penggerak dari seluruh proses pembangunan. Dengan menjadikan aspek ini sebagai prioritas, negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan manusia harus berlandaskan pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan modal manusia, dan penguatan modal sosial budaya. Ketiga pilar ini perlu didukung oleh pendekatan yang mencakup siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta keseimbangan dalam pertumbuhan populasi.

Dalam dinamika pemerintahan Kabinet Merah Putih, peran koordinasi menjadi krusial untuk menjembatani berbagai kebijakan sektoral agar dapat berjalan sama dan beriringan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai orkestrator yang memastikan seluruh kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan dapat bergerak serentak dalam mengimplementasikan agenda besar Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025 - 2029. Mandat ini menuntut sinergitas yang tinggi dalam mengawal program-program prioritas nasional, mulai dari pembangunan sumber daya manusia yang tepat sasaran, pembangunan ekosistem layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian kebudayaan, hingga penguatan ketangguhan dalam menghadapi bencana yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025, Kemenko PMK memegang tanggung jawab strategis dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Fungsi ini dijalankan untuk memastikan setiap kebijakan pusat hingga

daerah terkonsolidasi dengan baik demi mewujudkan visi misi Kabinet Merah Putih secara efektif dan akuntabel.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun sebagai potret nyata atas komitmen Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), sekaligus menjadi instrumen ketercapaian intervensi kebijakan yang dilakukan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Tugas Kemenko PMK dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian nasional dan penugasan Presiden secara inklusi dan terintegrasi.

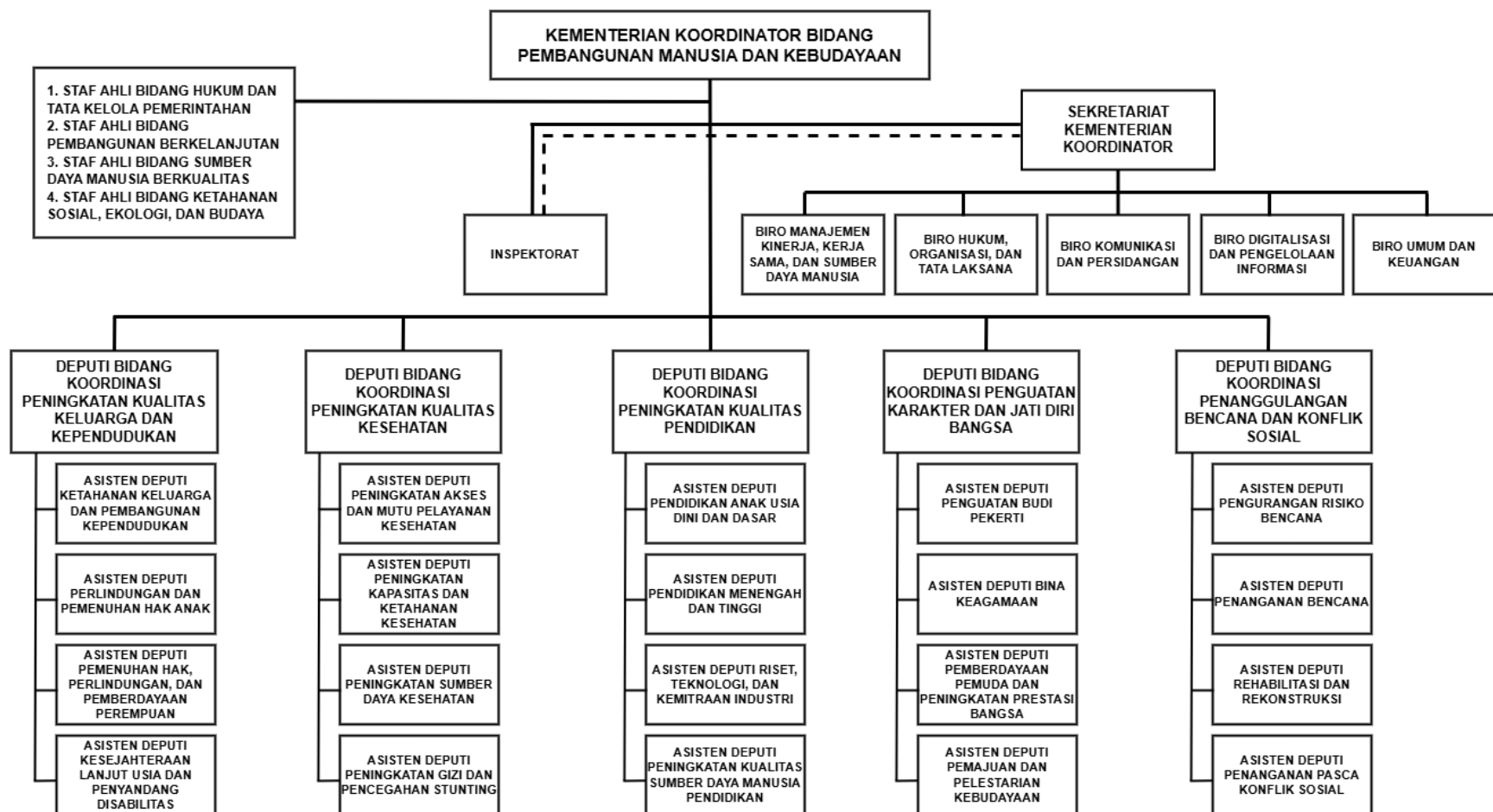
Dalam melaksanakan tugas Kemenko PMK, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;

- g. penyelesaian permasalahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK diberikan tugas dalam mengoordinasikan kementerian/lembaga sebagai berikut:

- a. Kementerian Agama;
- b. Kementerian Haji dan Umrah;
- c. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- e. Kementerian Kebudayaan;
- f. Kementerian Kesehatan;
- g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- i. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- j. instansi lain yang dianggap perlu.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kemenko PMK Tahun 2025

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Kemenko PMK yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diturunkan ke dalam Peraturan Menteri. Adapun struktur organisasi dan tata kerja Kemenko PMK yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK sebagaimana Gambar 1. Dalam Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2024, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan;
- c. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan;
- d. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan;
- e. Deputy Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;
- f. Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial;
- g. Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan;
- h. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan;
- i. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan
- j. Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya.

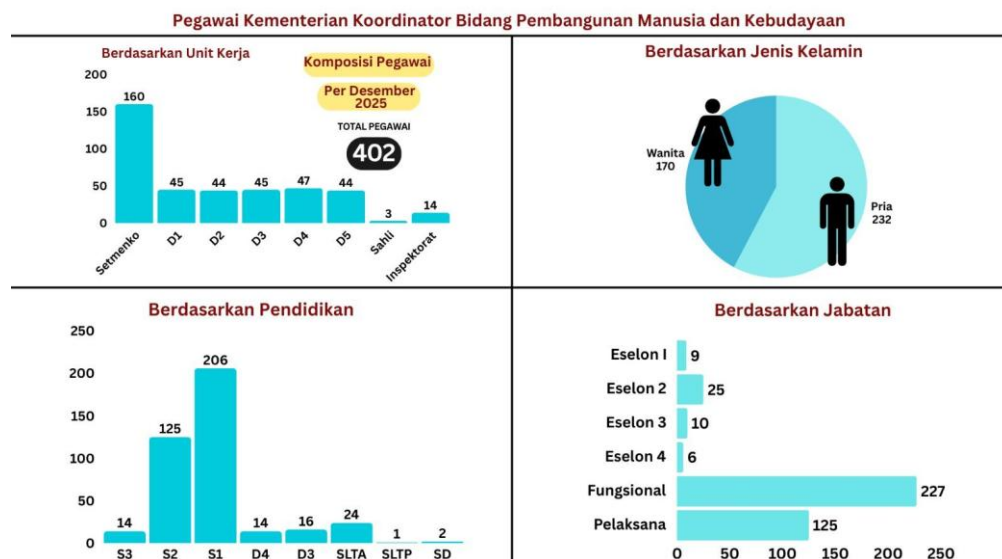
Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Hal ini bertujuan agar arah koordinasi tidak lagi bersifat sektoral namun multisektor yang berkoordinasi sejak hulu bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan sejak hulu. Sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Berdasarkan data per Desember 2025, jumlah pegawai Kemenko PMK tercatat sebanyak 402 orang. Komposisi pegawai berdasarkan unit kerja menunjukkan bahwa Sekretariat Kemenko PMK memiliki jumlah pegawai terbesar, yaitu 160 orang. Selanjutnya, pegawai pada Deputy I berjumlah 45 orang, Deputy II sebanyak 44 orang, Deputy III sebanyak 45 orang, Deputy IV sebanyak 47 orang, dan Deputy V sebanyak 44 orang. Selain itu, terdapat 3 orang Staf Ahli dan 14 orang pegawai pada Inspektorat.

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Kemenko PMK terdiri atas 232 orang pegawai pria dan 170 orang pegawai wanita, yang mencerminkan keterwakilan gender dalam struktur organisasi. Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Kemenko PMK berpendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 206 orang, diikuti oleh Strata 2 (S2) sebanyak 125 orang. Pegawai dengan pendidikan Strata 3 (S3) dan Diploma IV (D4) masing-masing berjumlah 14 orang, sementara pendidikan Diploma III (D3) sebanyak 16 orang. Selain itu, terdapat 24 orang pegawai berpendidikan SLTA, 1 orang SLTP, dan 2 orang berpendidikan SD.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai menduduki jabatan fungsional dengan jumlah 227 orang, diikuti oleh jabatan pelaksana sebanyak 125 orang. Sementara itu, pegawai yang menduduki jabatan struktural terdiri atas 9 orang Eselon I, 25 orang Eselon II, 10 orang Eselon III, dan 6 orang Eselon IV.



Gambar 2. Data Kepegawaian Kemenko PMK Tahun 2025

Jumlah dan komposisi sumber daya manusia Kemenko PMK berdasarkan unit kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jabatan tersebut mencerminkan dukungan SDM yang memadai dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko PMK tahun 2025 - 2029. Analisis capaian kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur

keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
2. **BAB II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang RPJMN 2025-2029, Renstra Kemenko PMK 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025;
3. **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran tahun 2025 termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya; dan
4. **BAB IV PENUTUP**, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, merupakan peta jalan pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan, sekaligus tahapan awal menuju pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam dokumen RPJMN ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan budaya menjadi pilar utama untuk mendorong transformasi Indonesia menjadi negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian Kemenko PMK dalam RPJMN 2025–2029 adalah transformasi pembangunan manusia yang terintegrasi. Hal ini mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter kebangsaan, ketahanan keluarga, hingga kesiapsiagaan terhadap bencana dan konflik sosial. Seluruh arah kebijakan ini dilaksanakan sejalan dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah “Memantapkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Manusia Berkualitas”. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, pemerintah menetapkan 8 Agenda Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Mempercepat penurunan kemiskinan.
2. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dasar.
3. Meningkatkan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Membangun ketahanan ekonomi.
5. Membangun wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
6. Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
8. Memperkuat sistem hukum, demokrasi, dan pelayanan publik.

Kemenko PMK memegang peran sentral sebagai koordinator, sinkronisator, dan pengendali kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan agenda-agenda tersebut, terutama dalam memastikan seluruh aspek pembangunan manusia dan kebudayaan terlaksana secara terpadu dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya

transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan delapan fokus arah kebijakan RPJPN 2025-2045 Tahap I, enam dari delapan fokus arah kebijakan tersebut termasuk dalam koordinasi bidang PMK. Arah kebijakan dan strategi nasional dalam RPJMN 2025-2029 menempatkan koordinasi peningkatan pembangunan manusia dan kebudayaan sebagai fondasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan merespon mandat RPJMN Tahun 2025-2029. Fokus utama kebijakan ini mencakup transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan wilayah dan sarana prasarana.

Dalam rangka mewujudkan transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya pengarusutamaan berbagai aspek strategis dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan nasional. Pendekatan pengarusutamaan ini menjadi bagian integral dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan yang tangguh dan berdaya saing.

Pengarusutamaan dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk menjamin keadilan antar generasi, keseimbangan ekologi, serta pelibatan aktif seluruh kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. Selain mempercepat agenda transformasi ekonomi, pengarusutamaan juga berfungsi sebagai pendekatan lintas sektor untuk memperkuat dampak kebijakan pembangunan terhadap kualitas manusia Indonesia.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam memperkuat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2025-2029 antara lain sebagai berikut:

1. **Pembangunan manusia berbasis siklus kehidupan**, yang dimulai dari penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pendidikan usia dini, hingga perlindungan lansia, dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan menjamin kesetaraan akses bagi seluruh penduduk Indonesia.
2. **Transformasi tata kelola pemerintahan** dilakukan dengan memperkuat integrasi layanan dasar berbasis wilayah, peningkatan kualitas kebijakan berbasis data, serta efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, adaptif, dan akuntabel.
3. **Pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial** terus diakselerasi, dengan mendorong partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya dalam pembangunan. Hal ini ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan dan memperkuat modal sosial bangsa.

4. **Penguatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim** dilakukan melalui pendekatan berbasis ekosistem, mitigasi risiko berbasis komunitas, serta peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi iklim.
5. **Pengarusutamaan nilai-nilai budaya dan karakter kebangsaan** menjadi elemen penting untuk membentuk identitas nasional yang kokoh dan inklusif. Kearifan lokal, warisan budaya, dan tradisi bangsa dimanfaatkan secara strategis sebagai kekuatan pemersatu dan daya dorong pembangunan.

2.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2025 - 2029

Agenda pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalam RPJMN 2025–2029 merupakan fondasi utama bagi percepatan transformasi sosial menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing global. Fokus pembangunan ini diarahkan pada penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta pengokohan karakter budaya bangsa yang luhur. Kebijakan strategis ini dirancang untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses pembangunan yang inklusif, sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan nasional secara berkelanjutan.

Arah besar pembangunan nasional tersebut telah dijabarkan secara detail ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PMK periode 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang mengintegrasikan seluruh program kerja kementerian dan lembaga di bawah koordinasi PMK agar berjalan selaras dengan visi besar Kabinet Merah Putih. Melalui Renstra ini, Kemenko PMK memperkuat peran kepemimpinannya dalam mengorkestrasi kebijakan lintas sektor, memastikan setiap sasaran strategis tercapai melalui langkah-langkah koordinasi yang solid dan sinkronisasi yang efektif di seluruh level pemerintahan.

Implementasi agenda strategis ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2025–2029. Regulasi ini menjadi acuan mutlak bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan manusia. Dengan adanya Permenko ini, setiap unit kerja memiliki pedoman operasional yang jelas untuk mewujudkan tata kelola kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi sepenuhnya pada peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

2.2.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029

yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Perumusan Visi ini bersifat ringkas, inspiratif, dan secara jelas menggambarkan kontribusi Kemenko PMK dalam membentuk manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berbudaya. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2025-2029 adalah ***“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Dengan mempertimbangkan visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, maka dirumuskan visi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode 2025-2029 adalah:

“Menjadi lembaga koordinator yang profesional dan inovatif dalam mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden tersebut, khususnya pada Asta Cita 4, 7, dan 8, Kemenko PMK menyelaraskan misi kementerian sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang presisi dan akurat berbasis data, dan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang profesional dan inovatif.

2.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indikator kinerja sasaran strategis Rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Tahun 2025 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2025. Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tahun 2025 disertai target kinerja terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2029
SS - 1 Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	IKSS 1 - Indeks Modal Manusia	0,56	0,59
	IKSS 2 - Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	80	90
	IKSS 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)	Memuaskan	Memuaskan
SS - 2 Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	IKSS 4 - Nilai Reformasi Birokrasi	90,5	92
	IKSS 5 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Sekretariat Kementerian	Memuaskan	Memuaskan

Melalui penguatan peran koordinatif terhadap indikator pembangunan nasional dan isu-isu strategis tersebut, Sasaran Strategis Kemenko PMK dirancang untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan pembangunan manusia dan kebudayaan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sasaran ini juga menjadi instrumen utama untuk memastikan keselarasan kebijakan, optimalisasi pelaksanaan program prioritas, serta percepatan pencapaian target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Penugasan khusus kepada Kemenko PMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 adalah untuk mengawal koordinasi Pencapaian Indikator Sasaran Utama Pembangunan Indeks Modal Manusia yang terdiri dari 5 indikator, dan mengawal koordinasi Pencapaian Indikator Prioritas Nasional khususnya PN 4 dan PN 8 yang terdiri dari 32 indikator.

2.3 Perjanjian Kinerja Menko PMK Tahun 2025

Pelaksanaan mandat strategis Kemenko PMK secara struktural dijabarkan dalam sasaran yang lebih operasional, dimana Sasaran Strategis 1 (SS-1) diturunkan menjadi sasaran pada Perjanjian Kinerja Menko PMK untuk mengawal pencapaian indikator pembangunan nasional yang bersifat makro. Sedangkan Sasaran Strategis 2 (SS-2) diturunkan menjadi sasaran pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko PMK guna memastikan dukungan manajemen serta tata kelola birokrasi internal berjalan secara optimal dalam mendukung tugas dan fungsi SKP Kemenko PMK. Pembagian sasaran ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pencapaian target pembangunan manusia di level nasional dengan penguatan kapasitas kelembagaan yang akuntabel dan transparan.

Sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat satu Sasaran Strategis dan tiga Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2025. Tabel 2.4. menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2025 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	Indeks Modal Manusia	0,56
	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	80
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Proses Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Memuaskan

2.4 Rencana Aksi Menko PMK Tahun 2025

Dalam rangka memantau pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut, terdapat ‘Target Kinerja Antara’ yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025 ini akan disampaikan pencapaian kinerja selama tahun 2025.

Tabel 3. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2025

Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target Akhir	Rencana Aksi			
			Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Indeks Modal Manusia	Kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor Indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan dan pendidikan	0,56	-	-	-	0,56
Indeks Kinerja Penyelenggaraan Sinkronisasi dan	Indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas proses sinkronisasi,	80	-	-	-	80

Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target Akhir	Rencana Aksi			
			Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Koordinasi serta Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan					
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Proses Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Indeks yang digunakan oleh Kemenko PMK untuk mengukur persepsi Kementerian/Lembaga mitra terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan	Memuaskan	-	-	-	Memuaskan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas	Indeks Modal Manusia	0,56	0,56	100%
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di	80	94,78	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi
Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)			
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK)	Memuaskan	Sangat Memuaskan	100%

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 dinyatakan dalam satuan indeks yang dilakukan oleh mitra Kemenko PMK. Sesuai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, target IK – 1 ditetapkan sebesar 0,56, target IK – 2 sebesar 80, dan target IK – 3 berada pada kategori “Memuaskan”.

3.1.1 Metodologi perhitungan Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia (IMM) merupakan instrumen pengukuran yang merefleksikan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan. Indeks ini disusun berdasarkan tingkat keterjangkauan akses serta kualitas pembangunan yang diterima individu selama periode tumbuh kembangnya, mulai dari masa kanak-kanak hingga usia produktif. IMM menggambarkan potensi produktivitas generasi mendatang dengan mempertimbangkan kondisi dasar yang membentuk kualitas manusia, yaitu peluang untuk bertahan hidup, memperoleh pendidikan yang layak, serta tumbuh dalam kondisi kesehatan yang optimal.

Pengukuran IMM dilakukan melalui tiga dimensi utama, yakni dimensi survival, pendidikan, dan kesehatan. Dimensi survival diukur menggunakan indikator Angka Kematian Balita sebagai proksi peluang kelangsungan hidup pada fase awal kehidupan. Dimensi pendidikan direpresentasikan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Nilai Asesmen Nasional yang mencerminkan hal yang dapat dipelajari dan lama masa sekolah yang dapat ditempuh. Sementara itu, dimensi kesehatan diukur melalui Prevalensi Stunting Balita dan Angka Kematian Penduduk usia 15–60 tahun sebagai cerminan kondisi kesehatan individu sejak usia dini hingga usia produktif

dalam mendukung kesiapan memasuki dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Secara keseluruhan, IMM memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas modal manusia suatu wilayah serta menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, IMM menjadi alat penting untuk melihat sejauh mana investasi pembangunan manusia saat ini akan menentukan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di masa depan.

3.1.2 Metodologi perhitungan Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)

Indeks Kinerja Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (IK SKP) PMK merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Indikator ini mengukur sejauh mana proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dilaksanakan secara optimal oleh unit-unit kerja di lingkungan Kemenko PMK.

Metode pengukuran dilakukan dengan menilai dua dimensi utama, yaitu: dimensi proses (*process*), yang dilihat dari mengacu jumlah rapat/kegiatan pada 5 (lima) komponen kegiatan; dan dimensi keluaran (*output*), yang diukur melalui jumlah dokumen Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang dihasilkan dan kualitas berupa kesesuaian RAK terhadap indikator kinerja sasaran strategis yang dikawal. Dengan kombinasi dua dimensi ini, Indeks Kinerja SKP PMK memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan fungsi koordinasi yang dilaksanakan Kemenko PMK, baik dari aspek usaha hingga kualitas keluaran.

3.1.3 Metodologi perhitungan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK)

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK PMK) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi kementerian/lembaga mitra terhadap kualitas pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan oleh Kemenko PMK. Indikator ini menjadi ukuran penting sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, pengendalian kebijakan (SKP), serta layanan dukungan manajemen internal. Pengukuran ini menjadi instrumen penting untuk memahami persepsi mitra koordinasi dan pegawai internal terhadap kualitas layanan yang diberikan, sekaligus mendukung pemenuhan standar pelayanan publik, penguatan akuntabilitas,

dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai kementerian koordinator.

Metode pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan dengan menggunakan rata-rata tertimbang skor kepuasan responden. Instrumen survei memuat penilaian kepuasan dan tingkat kepentingan pada skala Likert enam poin, dilengkapi pertanyaan terbuka untuk menggali perspektif kualitatif. Selain analisis deskriptif, laporan ini menggunakan analisis kesenjangan (*gap analysis*), *Importance-Performance Analysis* (IPA), serta analisis semantik untuk pertanyaan terbuka. Survei dilaksanakan secara daring melalui metode *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI).

Hasil survei dinyatakan dalam bentuk angka yang kemudian dikonversi ke dalam kategori penilaian, yaitu: kurang memuaskan (<3,00), cukup memuaskan (3,00–4,00), memuaskan (4,01–5,00), dan sangat memuaskan (5,01–6,00). Data diperoleh secara eksternal melalui pelaksanaan survei oleh Kemenko PMK kepada mitra yang berkaitan dengan kegiatan SKP Kemenko PMK. Dengan demikian, Indeks ini menjadi salah satu indikator yang menekankan aspek kualitas layanan koordinasi, yang berorientasi pada persepsi mitra kerja dan pemangku kepentingan terhadap kinerja organisasi.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Sasaran Strategis

a. Indikator Kinerja – 1 : Indeks Modal Manusia

IK 1 - Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia (IMM) adalah alat ukur utama yang digunakan Kemenko PMK dan Pemerintah Indonesia untuk menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) dan potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Sasaran Strategis Kemenko PMK (SS-1), IMM berfungsi sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Target Kemenko PMK adalah mengawal koordinasi kenaikan IMM dari baseline 0,54 (2020) menjadi 0,59 pada tahun 2029. Pada Tahun 2025 ditargetkan tercapai pada angka 0,56. Namun angka tersebut masih dalam proses perhitungan bersama Bappenas dan BPS, dengan angka IMM sementara tercapai target yakni 0,56.

IMM ditetapkan secara eksplisit sebagai Sasaran Utama Pembangunan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK karena peran sentralnya sebagai orkestrator kebijakan yang mencakup empat alasan substantif, yaitu: memberikan fokus holistik terhadap pembangunan manusia melalui integrasi dimensi kesehatan, pendidikan, dan produktivitas; menjadi kunci

kontribusi dalam memperkuat daya saing global demi mendukung Visi Indonesia Emas 2045; berfungsi sebagai wadah orkestrasi lintas sektor (SKP) untuk menyinkronkan interdependensi lima komponen utama di berbagai kementerian/lembaga; serta merupakan mandat khusus RPJMN 2025–2029 yang memformalisasi peran Kemenko PMK dalam mengawal *outcome* makro pembangunan sumber daya manusia nasional.

Tabel 5. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja	Definisi	Target	Capaian	Realisasi
Indeks Modal Manusia	Indeks yang dimandatkan pada Kemenko PMK untuk mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir pada tahun berjalan relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap	0,56	0,562*	100%*

Kemenko PMK menempatkan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan manusia yang berkelanjutan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pada tahun 2025, Kemenko PMK menetapkan target kinerja IMM sebesar 0,56. Saat ini, realisasi angka IMM tahun 2025 sedang dalam proses penghitungan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan hasil perhitungan sementara tercapai 0,562*. Meskipun angka resmi masih dalam proses finalisasi, Kemenko PMK secara konsisten mengawal koordinasi peningkatan IMM dari *baseline* 0,54 pada tahun 2020 menuju target jangka menengah sebesar 0,59 pada tahun 2029. Upaya ini didukung oleh tren positif pada berbagai komponen penyusunnya, seperti Angka Harapan Hidup (UHH) yang terus meningkat hingga mencapai 74,47 tahun pada 2025 dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang terealisasi sebesar 13,30 tahun atau mencapai 99,85% dari target.

Pencapaian kinerja IMM hingga tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berada pada jalur yang searah (*on track*) dengan sasaran strategis organisasi. Keberhasilan dalam menjaga tren

peningkatan ini didorong oleh efektivitas fungsi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) yang dijalankan Kemenko PMK terhadap kementerian/lembaga teknis pengampu lima komponen utama IMM. Program-program strategis seperti percepatan penurunan stunting serta kebijakan pembelajaran berbasis kompetensi untuk meningkatkan literasi dan numerasi nasional menjadi motor utama penguatan modal manusia. Kemenko PMK juga memastikan efisiensi penggunaan sumber daya melalui penajaman sasaran intervensi pada wilayah dengan disparitas tinggi, sehingga alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pekerja masa depan.

Secara internasional, IMM memiliki keselarasan konseptual dengan *Human Capital Index* (HCI) yang dirilis oleh Bank Dunia untuk mengukur potensi produktivitas generasi mendatang. Berdasarkan data laporan global terbaru, nilai HCI Indonesia 2023 berada pada angka 0,54, yang menempatkan Indonesia pada posisi yang terus mengalami perbaikan namun tetap memerlukan akselerasi untuk bersaing di level regional maupun global. Angka internasional ini memberikan gambaran bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini diprediksi akan mencapai 54% dari potensi produktivitas maksimalnya jika mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang sempurna.

Dalam upaya mencapai target jangka menengah, Kemenko PMK aktif melakukan langkah mitigasi terhadap berbagai tantangan, termasuk kendala geografis dan kesenjangan mutu layanan antarwilayah. Kemenko PMK memperkuat integrasi data lintas sektor, seperti pemanfaatan pencatatan berbasis Posyandu dan sistem surveilans kesehatan, untuk mengatasi keterbatasan data rutin. Selain itu, Kemenko PMK mengawal revisi regulasi strategis, termasuk Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, guna memperkuat kelembagaan di tingkat daerah. Melalui penguatan sinergi lintas sektor dan konsistensi implementasi kebijakan promotif-preventif, Kemenko PMK berkomitmen memastikan bahwa investasi negara di bidang pendidikan dan kesehatan terus memberikan hasil yang terukur secara global demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.

IMM bersifat holistik dan mencerminkan capaian pembangunan sepanjang siklus hidup individu. IMM terdiri dari lima komponen utama yang saling terkait dan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK:

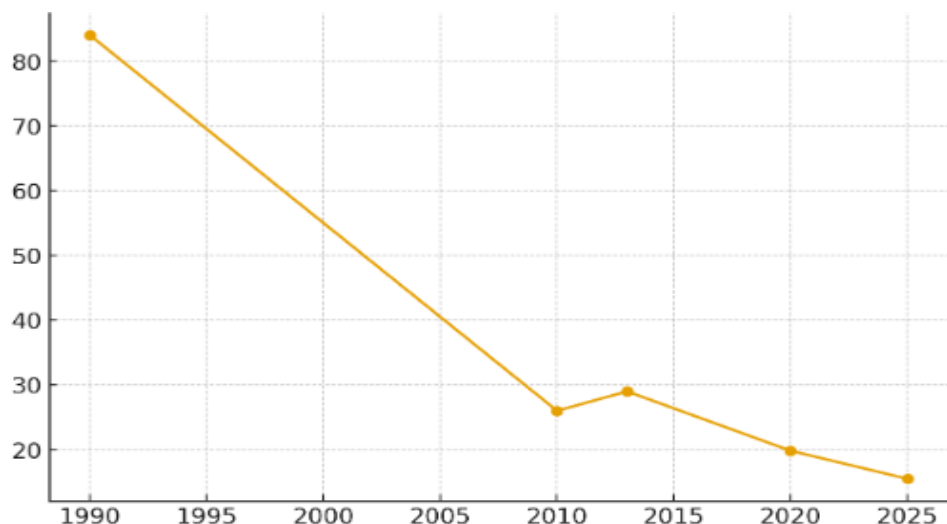
Angka Kelangsungan Hidup Balita (*Child Survival Rate*)

Angka Kematian Balita (*Under Five Mortality Rate/U5MR*) merupakan indikator kunci dalam menilai derajat kesehatan masyarakat serta efektivitas sistem pelayanan kesehatan nasional, sekaligus menjadi salah

satu indikator penting dalam sasaran pembangunan bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah kematian anak usia di bawah lima tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka kematian balita. Pada tahun 1990, angka kematian balita masih berada pada kisaran 84 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini kemudian menurun secara drastis pada tahun 2010 menjadi sekitar 26 kematian per 1.000 kelahiran hidup, meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2013 berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menjadi sekitar 29 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Tren penurunan kembali berlanjut hingga tahun 2020, di mana berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), angka kematian balita tercatat sebesar 19,83 per 1.000 kelahiran hidup. Secara kumulatif, penurunan lebih dari 70 persen tersebut menjadi landasan awal (*baseline* historis) bagi penetapan target penurunan Angka Kematian Balita dalam RPJMN 2025–2029. Selain itu, berdasarkan analisis tren dari berbagai sumber data resmi, proyeksi angka kematian balita pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 15–16 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan lampiran II RPJMN 2025–2029, diketahui target angka kematian balita pada tahun 2025 yakni sebesar 15 per 1.000 Kelahiran Hidup. Jika berdasarkan hasil analisis proyeksi sederhana yang telah dilakukan berdasarkan grafik diatas, maka capaian tahun 2025 diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, kenyataannya capaian AKB di tahun 2025 belum tersedia secara resmi mengingat BPS saat ini masih melakukan proses pemutakhiran data capaian AKB melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), sehingga capaian AKB pada tahun 2025 masih menggunakan data terakhir yang tersedia yakni 19,83 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil long form survei penduduk tahun 2020, dengan realisasi sebesar 75,64%. Sementara itu, capaian tersebut juga telah menunjukkan bahwa Angka Kematian Balita di Indonesia telah mencapai target 3.2 dari SDGs yang menetapkan bahwa pada tahun 2030 semua negara dapat mengurangi angka kematian anak di bawah usia 5 tahun (AKB) setidaknya hingga 25 per 1.000 kelahiran hidup.



Gambar 3. Grafik Tren Penurunan Angka Kematian Balita di Indonesia (1990-2020) dan Proyeksi Tahun 2025

Sumber: Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) maupun Survei Antar Sensus Penduduk (SUPAS) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Mengingat tidak tersedianya angka kematian balita per tahunnya, maka dalam rangka pemantauan dan evaluasi kematian balita, berbagai sektor termasuk kesehatan menggunakan surveilans/pelaporan rutin melalui sistem Maternal Perinatal Death Notification (MPDN). Berdasarkan MPDN, jumlah notifikasi kematian bayi meningkat dari tahun 2023 (sebanyak 35.563) ke tahun 2024 menjadi 33.150. Tidak hanya itu, jumlah puskesmas dan rumah sakit yang melapor jumlah kematian balita mengalami kenaikan secara signifikan, hal ini diharapkan jumlah kematian yang dilaporkan menggambarkan kondisi nyata dan menjadi dasar dalam intervensi untuk menurunkan angka kematian balita.

Dalam upaya menurunkan angka kematian balita, masih terdapat berbagai faktor penghambat. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan balita yang masih terbatas menyebabkan keterlambatan dalam pemanfaatan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Selain itu, terdapat kesenjangan mutu dan cakupan layanan KIA yang semakin diperparah oleh kendala geografis, keterbatasan akses transportasi, serta belum optimalnya kesiapan fasilitas kesehatan termasuk keterampilan klinis pada tenaga kesehatan. Kondisi tersebut menghambat pemerataan dan ketepatan pemberian layanan kesehatan esensial bagi balita, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Hal ini tercermin pada provinsi-provinsi seperti Papua dan Papua Barat masih mencatat angka kematian balita di atas 40 per 1.000 kelahiran hidup, jauh di atas rata-rata nasional, sementara sebagian besar provinsi di Jawa dan Bali telah mencapai angka di bawah 15 per 1.000 kelahiran hidup.

Selain itu, berdasarkan hasil laporan dan kajian, berbagai faktor penyebab kematian balita yang sebenarnya dapat dicegah masih ditemukan, baik yang berkaitan dengan kualitas layanan kesehatan, maupun keterlambatan dalam pencarian pertolongan. Oleh karena itu, Kemenko PMK melalui kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan kematian balita mendorong Kementerian Kesehatan selaku pengampu program maupun mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk mempercepat penurunan kematian balita di Indonesia melalui pemenuhan layanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONED dan PONEK), pemenuhan kebutuhan obat, BDRS dan NICU, penguatan ketersediaan tenaga medis kompeten, penguatan sistem rujukan maternal-neonatal yang efektif, peningkatan interoperabilitas sistem informasi kesehatan, pembentukan kelompok kerja AKI dan AKB di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, serta pemberdayaan masyarakat melalui penerapan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

Di sisi lain, Kemenko PMK melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga terkait telah melaksanakan berbagai respons terpadu yang bersifat satu kesatuan dan saling terkait dalam rangka mencapai penurunan angka kematian ibu, bayi, neonatal, dan balita. Respons tersebut mencakup pelaksanaan kampanye kesehatan seperti Gerakan Sayangi Ibu Hamil; penguatan skrining melalui pemeriksaan calon pengantin dan pasangan usia subur perempuan, skrining ibu hamil termasuk pemeriksaan ultrasonografi (USG), serta skrining bayi baru lahir; pelaksanaan tatalaksana faktor risiko pada calon pengantin dan PUS perempuan, penggunaan kontrasepsi bagi kelompok berisiko, serta tatalaksana komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Selain itu, penguatan sistem rujukan juga telah dilakukan melalui penyediaan layanan PONED dan PONEK serta dukungan program bantu rujuk.

Sementara itu, sepanjang tahun 2025 Kemenko PMK telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang diarahkan pada penguatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan percepatan penurunan angka kematian balita. Kegiatan tersebut meliputi sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, penguatan keselarasan program penurunan angka kematian balita dengan arah pembangunan nasional, serta fasilitasi dan dorongan kepada Kementerian Kesehatan sebagai pengampu program dan kementerian/lembaga terkait agar mendukung percepatan penurunan angka kematian balita sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

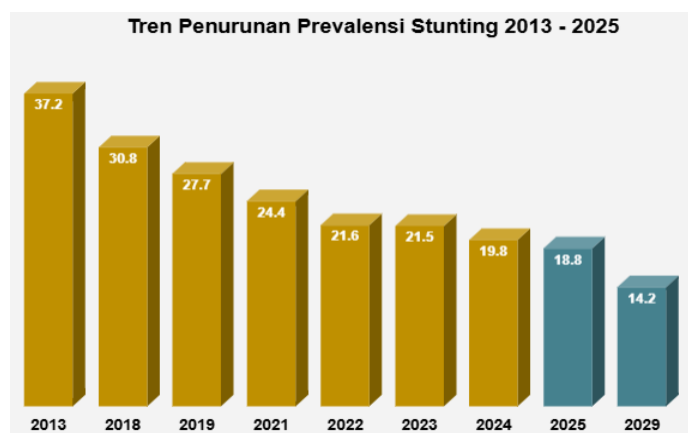
Selanjutnya, pada tahun 2026 strategi Kemenko PMK akan difokuskan pada penguatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan

percepatan penurunan angka kematian balita melalui peningkatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, penguatan peran pemerintah daerah pada wilayah prioritas, optimalisasi pemantauan dan evaluasi berbasis data, serta penguatan intervensi promotif dan preventif untuk mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Prevalensi Stunting

Dalam satu dekade terakhir, masalah gizi di Indonesia mengalami perbaikan yang cukup signifikan, terutama pada stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting menurun sebesar 1,7% dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada tahun 2024. Berdasarkan prevalensi tahun 2024, untuk pertama kalinya Indonesia keluar dari kategori “tinggi” menjadi “sedang” menurut standar World Health Organization (WHO). Secara keseluruhan, prevalensi stunting telah berhasil diturunkan dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 19,8% pada tahun 2024, mencerminkan bahwa berbagai intervensi nasional yang telah dijalankan Pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap penurunan prevalensi stunting.

Data capaian terhadap target menunjukkan bahwa meskipun prevalensi stunting secara nasional terus mengalami penurunan, tingkat ketercapaian terhadap target yang ditetapkan bervariasi antar periode. Pada tahun 2021 hingga 2024, capaian prevalensi stunting setiap tahunnya masih berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan intervensi. Sementara itu, untuk tahun 2025, meskipun belum tersedia data resmi akibat tidak dilaksanakannya SSGI, capaian tahun 2024 sebesar 19,8% telah mendekati target tahun 2025 sebesar 18,8%, dengan tingkat proyeksi realisasi mencapai 94,95%, yang menunjukkan adanya peluang percepatan pencapaian target.



Gambar 4. Grafik Tren Penurunan Prevalensi Stunting Indonesia Tahun 2013-2024 beserta Target 2025-2029

Tabel 6. Target dan Capaian Prevalensi Stunting Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Capaian	Realisasi
2021	21,1	24,4	86,48%
2022	18,4	21,6	85,19%
2023	16	21,5	74,42%
2024	14	19,8	70,71%
2025	18,8	19,8 (SSGI 2024)	94,95%

Penurunan prevalensi stunting tersebut tidak terlepas dari penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan pemerintah secara terintegrasi. Pada sektor kesehatan, intervensi difokuskan pada pendekatan siklus kehidupan, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Upaya ini mencakup pemantauan status gizi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, suplementasi gizi, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, serta promosi dan pendampingan pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI sesuai standar gizi. Seluruh intervensi tersebut diperkuat melalui peran fasilitas pelayanan kesehatan primer serta jejaring Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat komunitas.

Selain sektor kesehatan, percepatan penurunan stunting juga didorong oleh penguatan intervensi sensitif lintas sektor. Pemerintah mengintegrasikan agenda penurunan stunting dengan program penyediaan air minum aman dan sanitasi layak, perlindungan sosial, peningkatan ketahanan pangan keluarga, serta edukasi gizi dan pengasuhan. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan mitra pembangunan dan organisasi internasional menjadi faktor kunci dalam memastikan intervensi berjalan secara konvergen, efektif, dan menjangkau kelompok sasaran prioritas, khususnya keluarga berisiko stunting.

Meskipun capaian nasional menunjukkan tren yang positif, tantangan masih dihadapi dalam bentuk ketimpangan antar wilayah. Data SSGI 2024 menunjukkan variasi prevalensi stunting yang cukup lebar antarprovinsi, dengan beberapa provinsi telah mencatat prevalensi di bawah 10%, sementara di sejumlah provinsi lainnya masih berada di atas 30%. Selain itu, tidak seluruh provinsi mengalami penurunan prevalensi stunting, yang mengindikasikan bahwa efektivitas intervensi belum merata dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas daerah, kualitas pelaksanaan program, serta kondisi sosial ekonomi dan lingkungan setempat. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis wilayah (*place-based approach*) dan

penajaman intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Berdasarkan lampiran II RPJMN 2025-2029, diketahui target prevalensi stunting pada tahun 2025 yakni sebesar 18.8% dan pada tahun 2029 yaitu 14.2%. Survei gizi pada periode sebelumnya dilaksanakan setiap tahun, namun berdasarkan kebijakan Tim Percepatan Penurunan Stunting, pada tahun 2025 tidak dilakukan Survei Status Gizi Indonesia, sehingga data capaian prevalensi stunting tahun 2025 belum tersedia secara resmi. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi melalui optimalisasi sistem data rutin, antara lain pemanfaatan pencatatan dan pelaporan berbasis Posyandu, fasilitas pelayanan kesehatan, serta penguatan integrasi data lintas sektor agar tetap tersedia informasi yang andal sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Pada tahun 2025, Kemenko PMK melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian implementasi kebijakan secara lintas sektor dengan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kemenko PMK secara aktif mengawal proses revisi Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) guna memperkuat kelembagaan dan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Selain itu, berbagai kegiatan koordinasi, rapat, dan forum diskusi teknis dilaksanakan untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah, mendorong optimalisasi sumber daya, memberikan apresiasi kinerja daerah melalui mekanisme insentif fiskal, serta menajamkan fokus intervensi pencegahan stunting tanpa mengabaikan penanganan balita stunting. Upaya tersebut juga diarahkan pada peningkatan pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat mengenai dampak stunting terhadap kualitas sumber daya manusia, penguatan konvergensi intervensi mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi, serta pengarusutamaan isu stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.



Gambar 5. Menko PMK Memantau Program Makan Bergizi Gratis di SLB Cahaya Jaya Jakarta Utara pada 13 Januari 2025

Ke depan, upaya penurunan stunting perlu diarahkan pada penguatan kualitas dan keberlanjutan intervensi. Prioritas strategis mencakup peningkatan akurasi dan integrasi data gizi ibu dan anak, penajaman sasaran pada kelompok dan wilayah dengan prevalensi tinggi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan kader di tingkat komunitas. Sinergi lintas sektor juga perlu terus diperkuat untuk memastikan bahwa determinan sosial stunting, seperti kemiskinan, sanitasi, dan ketahanan pangan, dapat ditangani secara komprehensif. Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan dan percepatan penurunan stunting, diperlukan komitmen kebijakan yang konsisten, pendekatan berbasis bukti dan data, serta penguatan intervensi yang lebih fokus pada daerah dan kelompok rentan.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun berdasarkan pola partisipasi sekolah yang berlaku. Indikator ini mencerminkan peluang akses pendidikan ke depan serta menjadi komponen utama dalam pengukuran kualitas pembangunan sumber daya manusia.

Pada tahun 2025, target HLS yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar 13,32 tahun, sementara realisasi kinerja mencapai 13,30 tahun. Dengan demikian, tingkat ketercapaian kinerja HLS tahun 2025 mencapai sekitar 99,85 persen, sehingga dikategorikan hampir tercapai. Selisih yang relatif kecil antara target dan realisasi menunjukkan bahwa peluang akses pendidikan secara umum telah berkembang sesuai dengan arah kebijakan nasional, meskipun masih memerlukan penguatan lanjutan.

Secara antarperiode, realisasi HLS menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari sekitar 13,21 tahun pada 2024 menjadi 13,30 tahun pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam partisipasi pendidikan di berbagai jenjang, khususnya pendidikan menengah, serta mulai pulihnya aktivitas pendidikan pasca pandemi. Tren positif ini mengindikasikan bahwa kebijakan perluasan akses pendidikan telah memberikan dampak yang konsisten dari tahun ke tahun.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2025–2029, capaian HLS tahun 2025 telah berada pada jalur yang searah dengan sasaran jangka menengah, namun masih memerlukan percepatan agar target akhir RPJMN dapat tercapai secara optimal. Peningkatan HLS ke depan harus dijaga agar tidak melambat, terutama dengan memastikan keberlanjutan transisi peserta didik dari jenjang pendidikan dasar ke menengah dan lanjut.

Keberhasilan peningkatan HLS tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, kebijakan wajib belajar, serta dukungan program bantuan pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Namun demikian, capaian yang belum sepenuhnya optimal masih disebabkan oleh ketimpangan akses antar wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di daerah tertentu, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keberlanjutan sekolah.

Upaya yang telah dan akan dilakukan diarahkan pada penguatan akses pendidikan menengah, intervensi afirmatif di wilayah tertinggal, serta pengembangan pendidikan nonformal dan kesetaraan untuk memperluas peluang bersekolah. Selain itu, optimalisasi koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan anak usia sekolah tetap berada dalam sistem pendidikan.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan HLS tahun 2025 menunjukkan bahwa alokasi anggaran dan program pendidikan relatif efektif dalam memperluas akses pendidikan, tercermin dari kenaikan capaian dengan tambahan sumber daya yang terbatas. Ke depan, peningkatan efisiensi akan difokuskan pada penajaman sasaran program, pemanfaatan data terpadu, serta penguatan sinergi pusat dan daerah agar setiap tambahan anggaran memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan HLS.

Capaian Pembelajaran (Rata-rata Asesmen Tingkat Nasional)

Capaian Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional tahun 2025 menunjukkan performa yang solid dengan realisasi Literasi Membaca sebesar 62,12 dari target 62,89 serta Numerasi yang mencapai 54,01 dari target 54,36. Hasil

ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga tren peningkatan mutu pembelajaran yang searah dengan sasaran strategis pembangunan sumber daya manusia unggul. Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh efektivitas kebijakan pembelajaran berbasis kompetensi serta penguatan kapasitas guru dalam mengimplementasikan metode pengajaran literasi dan numerasi yang lebih mendalam. Pemanfaatan hasil Asesmen Nasional sebagai instrumen diagnosis juga telah memberikan kontribusi besar dalam memastikan intervensi pendidikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik.

Rata-rata nilai Asesmen Nasional (AN) pada domain Literasi Membaca dan Numerasi merupakan indikator utama untuk mengukur capaian mutu pembelajaran peserta didik serta efektivitas kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana diarahkan dalam RPJMN bidang pembangunan SDM.

Pada tahun 2025, realisasi nilai rata-rata Literasi Membaca dan Numerasi menunjukkan capaian yang mendekati target kinerja tahunan yang ditetapkan. Secara umum, ketercapaian indikator berada pada kategori hampir tercapai, yang mencerminkan adanya perbaikan mutu pembelajaran, meskipun masih terdapat kesenjangan kecil terhadap target yang direncanakan. Capaian tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik pada literasi membaca maupun numerasi. Peningkatan ini melanjutkan perbaikan bertahap sejak implementasi Asesmen Nasional sebagai pengganti Ujian Nasional, yang menitikberatkan pada kompetensi esensial dan berpikir tingkat tinggi. Namun demikian, laju peningkatan masih bersifat inkremental, belum menunjukkan akselerasi signifikan.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMN hingga akhir periode, capaian tahun 2025 telah berada pada jalur yang searah (*on track*), tetapi masih memerlukan penguatan intervensi agar target akhir RPJMN dapat tercapai secara optimal, khususnya pada satuan pendidikan dengan capaian rendah. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja didorong oleh kebijakan pembelajaran berbasis kompetensi, pemanfaatan hasil Asesmen Nasional untuk perbaikan satuan pendidikan, serta penguatan kapasitas guru melalui pelatihan. Namun, capaian belum optimal akibat disparitas mutu antarwilayah, variasi kualitas guru dan kepemimpinan sekolah, serta keterbatasan dukungan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi di lingkungan keluarga.

Pemerintah telah dan akan terus memperkuat intervensi berbasis data hasil AN, penguatan pembelajaran remedial dan diferensiasi, peningkatan kompetensi guru dalam pengajaran literasi dan numerasi, serta perluasan praktik baik melalui pendampingan satuan pendidikan. Fokus kebijakan

diarahkan pada sekolah dan daerah dengan capaian terendah untuk memperkecil kesenjangan mutu. Pelaksanaan Asesmen Nasional dinilai relatif efisien karena tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen diagnosis mutu pendidikan. Pemanfaatan hasil AN sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pembelajaran memungkinkan optimalisasi anggaran pendidikan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik.

Angka Kelangsungan Hidup Dewasa (*Adult Survival Rate*)

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029, Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk usia produktif sebagai bagian dari strategi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Salah satu indikator dalam pengukuran Indeks Modal Manusia (IMM) adalah tingkat kelangsungan hidup penduduk usia 15–60 tahun, yang mencerminkan derajat kesehatan serta kapasitas produktivitas penduduk usia kerja.

Berdasarkan arah kebijakan RPJMN tahun 2025–2029, angka kematian penduduk dewasa (usia 15–60 tahun) ditargetkan mengalami penurunan secara bertahap. Data capaian pada periode 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dan menjadi gambaran kondisi awal (*baseline historis*) dalam perumusan kebijakan periode RPJMN 2025–2029. Tren tersebut mencerminkan dukungan pelaksanaan program penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan, upaya promotif dan preventif, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.

Tabel 7. Perbandingan Statistik Kematian Menurut Kelompok Umur Dewasa di Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Total Kematian Teregistrasi (Orang)	Persentase Kematian Karena Sakit Biasa/Usia Tua (%)	Catatan Utama
2020	Data Long Form Sensus Penduduk	Angka kematian dewasa lebih rendah dibanding lanjut usia	Data <i>baseline</i> dari Long Form Sensus Penduduk 2020
2021	Data estimasi meningkat (Covid-19)	Kematian ibu dan orang dewasa meningkat signifikan	Dampak gelombang pandemi Covid-19

Tahun	Total Kematian Teregistrasi (Orang)	Persentase Kematian Karena Sakit Biasa/Usia Tua (%)	Catatan Utama
2022	Penurunan kematian dari 2021	Penyebab Covid-19 masih signifikan	Kondisi mereda tapi kematian masih cukup tinggi
2023	935.842 (terregistrasi, sekitar 56,7% cakupan)	90,59% akibat sakit biasa/usia tua	Data registrasi kematian terbaru oleh BPS
2024*	Proyeksi stabil	Tren penurunan kematian dan peningkatan harapan hidup	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pencegahan

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan angka kematian menurut kelompok umur dewasa (yang didefinisikan sebagai usia 15-60 tahun) di Indonesia periode 2020-2024. Jika dibandingkan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan selama masa pandemi, dengan kematian dominan disebabkan oleh penyakit kronis dan faktor usia tua. Melihat kondisi tersebut dan dalam upaya menurunkan angka kematian dewasa, peningkatan sistem kesehatan, pencegahan penyakit, dan penguatan sistem registrasi kematian menjadi aspek prioritas yang harus diperkuat ke depan.

Namun demikian, untuk tahun 2025 capaian indikator Angka Kematian Penduduk Dewasa (usia 15–60 tahun) belum dapat dinilai, mengingat Kementerian PPN/Bappenas masih melakukan pengkajian serta formulasi baseline dan metodologi penetapan target penurunan indikator dimaksud. Meskipun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 telah diarahkan untuk tetap selaras dengan sasaran RPJMN 2025–2029. Ke depan, upaya peningkatan kinerja akan difokuskan pada konsistensi implementasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengendalian faktor risiko kesehatan penduduk usia produktif guna memastikan pencapaian target penurunan angka kematian dewasa secara berkelanjutan dan kontribusinya terhadap peningkatan Indeks Modal Manusia nasional.

Meskipun nilai indikator Angka Kematian Penduduk Dewasa (usia 15–60 tahun) belum tersedia, pada tahun 2025 Kemenko PMK tetap berperan melalui Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian (SKP) dalam mendorong

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas layanan kesehatan serta penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, khususnya pada penduduk usia produktif. Upaya tersebut ditujukan untuk menekan risiko kematian dini dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selanjutnya, pada tahun 2026 strategi penurunan angka kematian penduduk dewasa (usia 15–60 tahun) akan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi kelompok usia produktif, melalui penguatan upaya promotif dan preventif, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta optimalisasi pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data.

b. Indikator Kinerja – 2 : Indeks Kinerja Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (IK SKP)

IK 2 - Indeks Kinerja Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

Pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan pilar strategis dalam pencapaian tujuan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024, Kemenko PMK memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian (SKP) urusan kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan guna memastikan arah kebijakan lintas sektor dapat berjalan secara terpadu dan mendukung efektivitas pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi lintas sektor di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan masih perlu dilakukan perbaikan, utamanya dalam penyelarasan arah kebijakan lintas Kementerian/Lembaga, penyediaan data yang konsisten untuk pemantauan, hingga konsistensi tindak lanjut kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Kompleksitas isu-isu strategis di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, hingga karakter dan jati diri bangsa menuntut koordinasi yang tidak hanya responsif, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi ketidaksinkronan sejak tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pada tahun 2025 Kemenko PMK mengembangkan Indeks Kinerja Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian (IK SKP) sebagai instrumen yang bertujuan untuk:

1. Menggambarkan kinerja SKP secara terukur, tidak hanya pada hasil akhir (*outcome*), namun juga kualitas pelaksanaan dan upaya yang dilakukan.
2. Menjadi upaya perbaikan kedepan dan dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based*).
3. Memperkuat efektivitas penyelenggaraan fungsi Kemenko PMK.

IK SKP mengintegrasikan 2 (dua) dimensi yang mencerminkan keseluruhan siklus pelaksanaan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, yaitu:

1. Dimensi Proses (Bobot 60%)

Dimensi ini menilai kualitas pelaksanaan koordinasi di seluruh tahapan kebijakan, mencakup keteraturan perencanaan, ketepatan tata kelola, konsistensi tindak lanjut, dan efektivitas pelibatan pemangku kepentingan. Pemberian bobot yang lebih besar (60%) didasarkan pada prinsip *governance-based performance measurement* dan argumen metodologis bahwa tata kelola proses yang kuat (*enabling factors*) adalah penentu keberhasilan capaian kebijakan lintas sektor. Indikator pada dimensi Proses mengacu jumlah rapat/kegiatan pada 5 (lima) tahapan, yaitu Penyusunan Program (PP), Identifikasi Masalah (IM), Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian (SKP), Monitoring dan Evaluasi (ME), dan Penyusunan Rekomendasi (PR).

2. Dimensi Output (Bobot 40%)

Dimensi ini menilai hasil langsung dari proses koordinasi yang dilakukan, berupa produk kebijakan atau fasilitasi penyelesaian isu lintas kementerian/lembaga. Dimensi ini mengukur kuantitas berupa jumlah dokumen Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang dihasilkan dan kualitas berupa kesesuaian RAK terhadap indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan.

Tabel 8. Kategori Capaian IK SKP

Nilai Capaian	Kategori
85 - 100	Sangat Baik
70 - 84	Baik
55 - 69	Cukup
40 - 54	Kurang
< 40	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai IK SKP Kemenko PMK tercatat sebesar 94,78 atau melampaui dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 80. Tahun 2025 merupakan tahun pertama (*baseline*) implementasi Indeks Kinerja SKP sebagai instrumen pengukuran kinerja yang mengintegrasikan Dimensi Proses dan Dimensi Output. Berdasarkan capaian tahun 2025, angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kemenko PMK yang diukur melalui dimensi proses dan output dapat dikategorikan sangat baik.

Tabel 9. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja	Definisi	Target	Capaian	Realisasi
Indeks Kinerja Penyelenggaraan Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	Indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	80	94.78	100%

Terlampauinya realisasi Indeks Kinerja SKP sebesar 94.78 terhadap target 80 merupakan hasil dari transformasi manajerial yang mengedepankan kerja berbasis proses dan bukti (*evidence-based*). Keberhasilan ini disebabkan oleh capaian unit kerja dalam menginternalisasi 5 (lima) tahapan, di mana penekanan pada Dimensi Proses (bobot 60%) telah menciptakan standarisasi tata kelola yang lebih akuntabel dan terukur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketajaman dalam tahap Identifikasi Masalah menjadi kunci utama, di mana penggunaan data yang konsisten memungkinkan Kemenko PMK mendiagnosa hambatan kebijakan lintas sektor secara akurat, sehingga Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang dihasilkan pada Dimensi Output (bobot 40%) tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas substansi yang relevan dengan sasaran strategis nasional.

Keberhasilan ini juga didukung dengan penguatan fungsi pengendalian melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, sehingga potensi ketidaksinkronan kebijakan dan program antar Kementerian/Lembaga dapat dimitigasi sejak tahap perencanaan. Komitmen dalam memfasilitasi pengambilan keputusan strategis melalui pelaksanaan rapat koordinasi menjadi alat yang penting dalam mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan memastikan keputusan strategis diambil secara cepat dan tepat.

Meskipun capaian tahun ini melampaui dari target yang ditetapkan, Kemenko PMK tetap berkomitmen untuk menjadikan hasil ini sebagai dasar evaluasi berkelanjutan. Ruang perbaikan kedepan akan difokuskan pada penguatan digitalisasi pemantauan serta peningkatan sinergitas lintas sektor guna memastikan efektivitas kebijakan tetap adaptif terhadap dinamika isu strategis nasional yang semakin kompleks.

c. Indikator Kinerja – 3 : Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK)

IK 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Survei terhadap pemangku kepentingan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kemenko PMK untuk mengevaluasi kualitas pelayanan diberikan. Kegiatan ini berlandaskan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya pelayanan yang efisien, transparan, dan responsif. Lebih lanjut, aturan teknis mengenai metode pengukuran kepuasan ini dirinci dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kedua regulasi tersebut memberikan kerangka unsur pelayanan yang menjadi dasar penilaian kualitas layanan publik, termasuk dalam konteks sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) lintas sektor di Kemenko PMK.

Survei Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) Tahun 2025 dilaksanakan oleh Kemenko PMK sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, pengendalian kebijakan (SKP), serta dukungan manajemen internal. Pengukuran ini menjadi instrumen penting untuk memahami persepsi mitra koordinasi dan pegawai internal terhadap kualitas layanan yang diberikan, sekaligus mendukung pemenuhan standar pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik merumuskan unsur-unsur penting yang menjadi parameter dalam menilai kepuasan masyarakat dan kualitas layanan yang diberikan, meliputi:

1. Persyaratan: syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu Penyelesaian: jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif: ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Kompetensi Pelaksana: kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana: sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana: sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Selain menilai aspek proses dan kepuasan layanan, instrumen survei juga dirancang untuk menangkap persepsi pemangku kepentingan mengenai dampak sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) terhadap pencapaian kinerja mitra. Penilaian ini difokuskan pada keberlanjutan hasil koordinasi, kontribusinya terhadap pelaksanaan program atau kebijakan instansi, serta efektivitas peran SKP dalam mendukung penyelesaian isu strategis lintas sektor.

Instrumen survei memuat penilaian kepuasan dan tingkat kepentingan pada skala Likert enam poin, dilengkapi pertanyaan terbuka untuk menggali perspektif kualitatif. Responden eksternal menerima undangan survei berdasarkan daftar pengguna layanan SKP, sedangkan responden internal mengakses survei melalui *Single Sign-On* (SSO) Kemenko PMK. IKPK diperoleh dengan menghitung rerata tertimbang skor

tingkat kepuasan berdasarkan atribut pertanyaan skala Likert. Adapun pengkategorian nilai IKPK adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Kategori Capaian IKPK SKP

Nilai Capaian	Kategori
< 3,00	Kurang Memuaskan
3,00 - 4,00	Cukup Memuaskan
4,01 - 5,00	Memuaskan
5,01 - 6,00	Sangat Memuaskan

Tabel 11. Realisasi Capaian Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja	Definisi	Target	Capaian	Realisasi
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK)	Instrumen untuk menilai persepsi mitra kerja terhadap efektivitas proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dijalankan oleh Kemenko PMK.	Memuaskan	Sangat Memuaskan	100%

Pada tahun 2025, IKPK Kemenko PMK mencatat capaian dengan nilai 5,387 dan masuk dalam kategori “Sangat Memuaskan” dan melampaui target (Memuaskan) yang telah ditetapkan. Dengan partisipasi dari 781 responden, survei ini menghasilkan data yang kuat untuk evaluasi kinerja. Secara umum, berdasarkan jenis kelamin, responden paling banyak berjenis kelamin laki-laki (60%).

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar unit kerja di bawah Kemenko PMK mencapai atau melampaui target IKPK. Namun, analisis menunjukkan bahwa dari 19 variabel yang diukur, sebagian besar masih memiliki ruang untuk perbaikan, dengan tindak lanjut hasil koordinasi menjadi prioritas utama untuk peningkatan kualitas layanan.

Keberhasilan Kemenko PMK dalam capaian IKPK disebabkan penguatan layanan SKP kepada stakeholder melalui komunikasi yang intensif, responsif, dan mudah diakses, proses koordinasi yang sederhana

dan tidak berbelit-belit, peran strategis Kemenko PMK sebagai penghubung dengan stakeholder terkait, serta penerapan pendekatan yang inklusif dalam pelaksanaan tugas koordinatif.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 capaian IKPK, yang saat itu bernama Indeks Kepuasan Stakeholder (IKS), yaitu 5,46 atau pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,073 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa perubahan utama seiring berlakunya Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kemenko PMK. Pendekatan survei perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan dinamika tugas dan fungsi Kemenko PMK. Terdapat penurunan jumlah responden yang terlibat dalam survei dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur. Selain itu, terdapat perubahan dalam penetapan target kinerja, dari sebelumnya berbentuk nilai numerik menjadi kategorik.

Berdasarkan temuan kualitatif, terdapat beberapa aspek krusial yang perlu ditingkatkan, terutama terkait konsistensi jadwal pelaksanaan koordinasi dan kejelasan informasi yang diterima oleh para responden. Selain itu, efektivitas tindak lanjut atas masukan yang diberikan oleh pemangku kepentingan masih dipandang perlu dioptimalkan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara umum kinerjanya terjaga, masih terdapat ruang perbaikan dalam mengelola ekspektasi dan interaksi dengan mitra kerja selama masa penyesuaian struktur organisasi.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Kemenko PMK berkomitmen untuk memperkuat mekanisme kontrol terhadap jadwal pelaksanaan koordinasi serta mengoptimalkan tindak lanjut atas masukan dari para pemangku kepentingan. Upaya strategis ini dilakukan untuk menjamin ketepatan pengukuran kinerja pada periode mendatang dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan hasil pengukuran kinerja pada tahun berikutnya akan lebih akurat dan mampu mencerminkan peningkatan kualitas pelaksanaan survei secara menyeluruh.

3.2.2 Indikator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

a. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Prioritas Nasional 04 - Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)

Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai

semua Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur.

Capaian Prioritas Nasional 04 menunjukkan kemajuan signifikan dengan proyeksi TFR mencapai 2,12 pada tahun 2025, mendekati *replacement level* berkat sinergi anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), penguatan layanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan kolaborasi strategis lintas sektor yang berhasil menjaga stabilitas kependudukan pasca-pandemi. Meskipun demikian, tantangan berupa keterbatasan tenaga medis tersertifikasi, tingginya angka putus pakai (*drop out*), serta disparitas capaian antarwilayah masih memerlukan intervensi tajam melalui peningkatan kualitas konseling dan pemenuhan *unmet need* yang berbasis hak reproduksi. Ke depan, Kemenko PMK berkomitmen memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk memastikan struktur penduduk yang tumbuh seimbang ini dapat bertransformasi menjadi modal manusia unggul yang produktif guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.



Gambar 6. Grafik Capaian Angka Kelahiran Total Tahun 2020 - 2025

Keberhasilan dalam mencapai target angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) merupakan buah dari sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Momentum ini digerakkan oleh intensifnya advokasi dan edukasi langsung kepada Pasangan Usia Subur (PUS) melalui peran vital Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) serta kader institusi masyarakat di tingkat akar rumput. Keberhasilan tersebut didorong pula oleh optimalisasi dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di tingkat daerah yang secara efektif meningkatkan akses terhadap Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Selain itu, penguatan layanan KB pasca-persalinan serta pemenuhan ketersediaan alat kontrasepsi (alokon) di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) telah memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara tepat waktu, dengan dukungan strategis dari mitra seperti TNI, POLRI, dan organisasi profesi.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan. Kendala utama terletak pada terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi resmi, yang berimbas pada tingginya angka putus pakai (*drop out*) kontrasepsi akibat kurang optimalnya kualitas konseling

mengenai manajemen efek samping. Selain itu, aspek keputusan responsif gender dalam pemenuhan hak-hak reproduksi masih perlu diperkuat agar setiap pasangan dapat mengambil keputusan secara sadar, sukarela, dan berbasis hak.

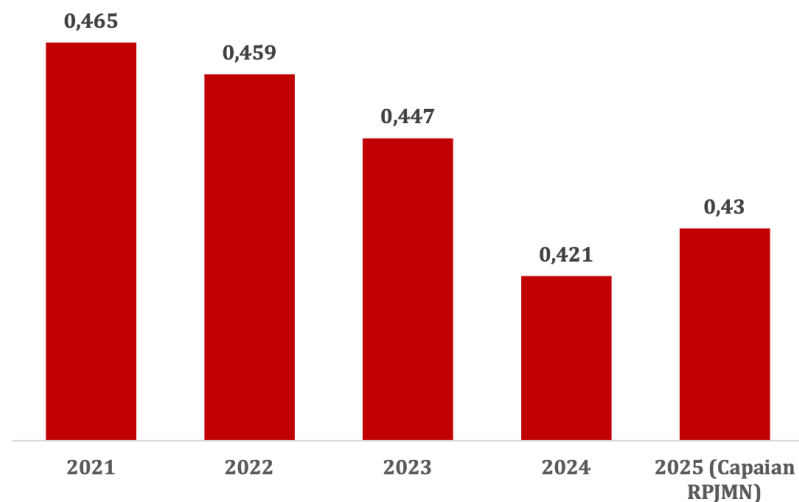
Sebagai langkah tindak lanjut, diperlukan transformasi kebijakan melalui empat pilar solusi utama, yaitu:

1. Transformasi digital melalui pengembangan platform "*e-Counseling KB*" untuk menyediakan layanan tele-konsultasi 24/7 guna menekan angka *drop out*, serta penguatan sistem monitoring alokon secara *real-time*.
2. Percepatan sertifikasi tenaga kesehatan melalui skema *blended learning* dan *Massive Open Online Courses* (MOOC) yang terintegrasi dengan syarat akreditasi fasyankes.
3. Kebijakan "asimetris" berbasis geografis melalui redistribusi dana BOKB yang lebih besar ke daerah dengan TFR tinggi serta pembentukan *Task Force* KB untuk wilayah 3T.
4. Melakukan *re-branding* program Bangga Kencana dengan pendekatan hak dan gender, termasuk menggalakkan kampanye "Lelaki Peduli" serta mengintegrasikan edukasi KB ke dalam program jaring pengaman sosial.

Dalam menjaga efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan anggaran BOKB terus dievaluasi guna memastikan ketersediaan alokon di lapangan tidak terhambat. Kemenko PMK memegang peran sentral dalam menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas kementerian/lembaga untuk memastikan kebijakan kependudukan tetap berada pada jalur Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Dengan menekankan pada peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi (*unmet need*), pemerintah berkomitmen memastikan setiap permintaan layanan KB terpenuhi secara berkualitas. Langkah strategis ini merupakan pondasi utama dalam mewujudkan modal manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif menuju visi Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional 04 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator pembangunan yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam aspek pembangunan manusia. IKG mencerminkan kehilangan potensi pembangunan akibat ketidaksetaraan gender, sehingga semakin rendah nilai IKG menunjukkan semakin kecil kesenjangan gender dan semakin baik kualitas pembangunan yang inklusif. Pengukuran IKG didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.



Gambar 7. Grafik Capaian Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2025

Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya tren penurunan ketimpangan gender yang cukup konsisten dalam kurun waktu 2021 - 2024. Pada tahun 2021, nilai IKG tercatat sebesar 0,465, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,459 pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 0,447 pada tahun 2023. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan nilai IKG mencapai 0,421, yang mencerminkan perbaikan nyata dalam pengurangan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki pada berbagai dimensi pembangunan.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menegaskan bahwa komitmen kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta integrasi perspektif gender dalam pembangunan manusia berkontribusi nyata terhadap penurunan ketimpangan gender. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada konsolidasi capaian, penguatan intervensi yang lebih tepat sasaran, serta pemanfaatan data terpilah untuk memastikan bahwa penurunan IKG tidak hanya tercapai secara nasional, tetapi juga merata hingga tingkat daerah dan kelompok rentan.

Dalam mencapai target yang telah ditentukan, masih terdapat beberapa isu yang muncul yaitu:

1. Tantangan regulasi di bidang pemenuhan hak dan pemberdayaan perempuan, berupa:
 - Indonesia telah memiliki Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2025-2045, namun peta jalan tersebut belum dituangkan dalam bentuk regulasi, sehingga pelaksanaannya belum optimal dan belum diikuti sepenuhnya oleh semua Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
 - Rancangan Peraturan Presiden Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (RPerpres Stranas PUG) masih dalam tahap pembahasan.

- Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih dalam pembahasan ulang di DPR.
2. Tantangan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, berupa:
- Pandangan sosial yang mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan.
 - Norma dan peran gender tradisional, seperti beban domestik dan tanggung jawab keluarga yang lebih besar pada perempuan
 - Keterbatasan ekonomi yang menghambat akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan
 - Tingginya proporsi perempuan di sektor informal yang minim perlindungan sosial dan ketenagakerjaan serta mendominasi perempuan pada sektor pekerjaan yang tidak dibayar

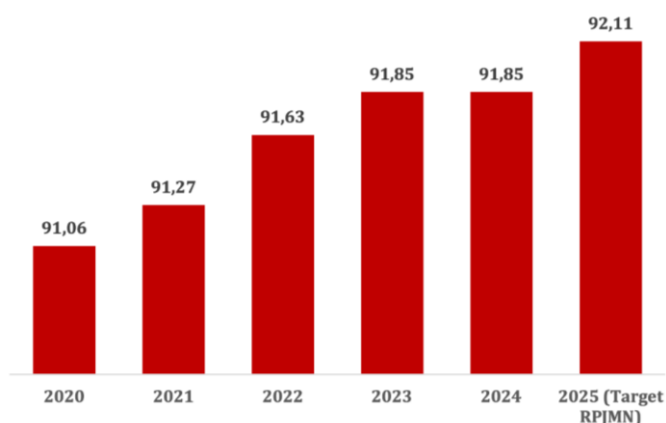
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Kemenko PMK melakukan koordinasi melalui penguatan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, perluasan program pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan keterampilan kerja, serta penguatan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang responsif gender. Di bidang kesehatan dan pendidikan, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan layanan, termasuk edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan anak, yang secara langsung berdampak pada dimensi IKG.

Selain itu, penerapan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran, pemanfaatan data terpilah gender sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi strategi penting untuk memastikan intervensi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan kombinasi pendekatan struktural dan kultural tersebut, diharapkan penurunan IKG tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan perubahan kualitas kesetaraan gender yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Dalam konteks ini, Kemenko PMK berperan strategis melalui fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga dalam pembangunan manusia yang responsif gender. Sepanjang Tahun 2025, Kemenko PMK mendorong integrasi isu kesetaraan gender dalam kebijakan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial, sekaligus memperkuat pemanfaatan data terpilah gender sebagai dasar perencanaan dan evaluasi.

Prioritas Nasional 04 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender, yang dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.



Gambar 8. Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 - 2025

IPG diukur berdasarkan dimensi Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan. Pada dimensi Ekonomi dilihat dari Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2024 sebesar 17.345 juta/orang/tahun untuk laki-laki dan 9.922 juta/orang/tahun. Pada dimensi Pendidikan dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah dimana 9,17 tahun untuk laki-laki dan 8,54 tahun untuk perempuan. Sedangkan untuk dimensi kesehatan dilihat dari angka harapan hidup dimana 70,32 tahun untuk laki-laki dan 74,21 tahun untuk perempuan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target IPG sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, pada tahun 2025 Kemenko PMK melaksanakan berbagai kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga. Upaya ini diarahkan untuk mempercepat penurunan kesenjangan gender antar dimensi IPG, khususnya pada dimensi ekonomi yang masih menunjukkan disparitas signifikan antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, sinkronisasi dan koordinasi juga dilaksanakan untuk memastikan kebijakan dan program agar konsisten dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 serta prinsip pemenuhan hak perempuan. Selain itu juga upaya dilakukan untuk mencegah kebijakan yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi gender, serta memastikan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi perempuan sepanjang siklus hidup, sejalan dengan angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi (74,21 tahun).

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai pembangunan gender adalah:

1. Kesenjangan struktural dalam akses dan kontrol ekonomi, dimana perempuan masih terkonsentrasi pada sektor informal, pekerjaan rentan, dan usaha berproduktivitas rendah, sehingga capaian pendidikan yang relatif setara belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan pengeluaran per kapita perempuan.
2. Keterbatasan mekanisme pengendalian lintas sektor, khususnya dalam pemantauan dampak kebijakan ekonomi terhadap kesenjangan gender, termasuk ketersediaan data terpilah dan indikator antara yang mampu menangkap kemajuan nyata pemberdayaan ekonomi perempuan.

Oleh karena itu, di tahun 2026 untuk memastikan keberhasilan pencapaian IPG di tahun 2029, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

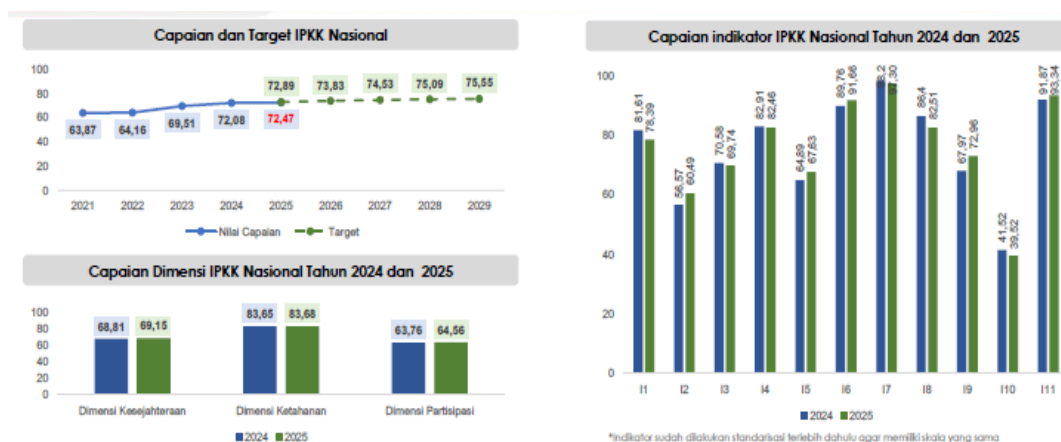
1. Koordinasi kelembagaan pengarusutamaan gender di level pusat dan daerah.
2. Pembentukan regulasi ekonomi perawatan yang menyeluruh (tidak terbatas pada aspek ketenagakerjaan).
3. Penyelarasan definisi dan indikator pemberdayaan perempuan.

Prioritas Nasional 04 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan kualitas keluarga secara komprehensif, mencakup dimensi kesejahteraan yang menggambarkan kondisi dasar keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup esensial, yang diukur melalui indikator ketahanan pangan rumah tangga, kelayakan hunian, serta kondisi kesehatan anggota keluarga, dimensi ketahanan yang merefleksikan kapasitas keluarga dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas kehidupan keluarga, baik secara ekonomi, sosial, maupun relasional, serta dimensi partisipasi yang menggambarkan keterlibatan keluarga dalam kehidupan sosial dan ekonomi, yang diukur melalui partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial, peran keluarga dalam aktivitas usaha produktif, serta keberadaan pengeluaran transfer.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, capaian IPKK nasional tahun 2025 tercatat sebesar 72,47, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 72,08. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pembangunan keluarga secara agregat dari tahun ke tahun. Meskipun mengalami peningkatan, capaian IPKK nasional tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 72,89. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah pembangunan keluarga telah berada pada jalur

yang positif, namun masih diperlukan penguatan kebijakan dan konsistensi pelaksanaan program lintas sektor agar target IPKK dapat dicapai secara optimal.



Gambar 9. Grafik Capaian IPKK Nasional per Dimensi dan Indikator

Berdasarkan hasil capaian sementara, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu:

1. Masih rendahnya capaian Dimensi Partisipasi, meskipun dimensi ini mencatatkan kenaikan paling signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa basis partisipasi keluarga, khususnya pada aspek partisipasi sosial dan ekonomi, belum cukup kuat untuk mendorong capaian IPKK secara agregat.
2. Belum optimalnya capaian Dimensi Kesejahteraan, terutama pada indikator yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga dan kondisi dasar kehidupan keluarga, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan IPKK masih terbatas.
3. Masih adanya indikator dengan capaian rendah atau mengalami penurunan, yang menahan akumulasi peningkatan IPKK secara keseluruhan meskipun sebagian indikator menunjukkan perbaikan.
4. Pendekatan kebijakan pembangunan keluarga yang masih cenderung sektoral dan berbasis aktivitas, sehingga konvergensi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah belum sepenuhnya menghasilkan *outcome* yang signifikan dan merata pada tingkat keluarga.

Untuk menjawab tantangan kompleksitas pembangunan keluarga dan mengoptimalkan capaian IPKK, langkah-langkah strategis yang akan diambil adalah:

1. Memperkuat posisi IPKK sebagai instrumen utama dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar intervensi yang dilakukan lebih terukur dan selaras.

2. Melakukan sinkronisasi IPKK guna mendukung penyusunan bahan kebijakan, laporan, dan rekomendasi strategis yang memanfaatkan integrasi data keluarga lintas sektor secara komprehensif.
3. Memperkokoh sinergi program peningkatan partisipasi dan ketahanan keluarga melalui kolaborasi aktif antar instansi untuk memastikan dampak pembangunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari kebutuhan tersebut, Kemenko PMK mendorong implementasi AKSI Keluarga sebagai kerangka kerja kolaboratif lintas kementerian/lembaga dalam memperkuat konvergensi kebijakan pembangunan keluarga. AKSI Keluarga dirancang sebagai pendekatan tematik yang mengintegrasikan isu, data, dan intervensi kebijakan keluarga lintas sektor, dengan IPKK digunakan sebagai rujukan bersama untuk mengidentifikasi permasalahan prioritas, menentukan fokus intervensi, serta memantau capaian kebijakan secara terukur. Melalui AKSI Keluarga, Kemenko PMK memfasilitasi penyelarasan program dan kegiatan kementerian/lembaga agar tidak berjalan secara sektoral, melainkan saling melengkapi dan berorientasi pada outcome peningkatan kualitas keluarga.



Gambar 10. Menko PMK memberikan arahan dalam acara AKSI Keluarga Indonesia

Selain memperkuat koordinasi di tingkat pusat, AKSI Keluarga juga diarahkan untuk mendukung sinkronisasi kebijakan pusat-daerah melalui penguatan peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan keluarga. Dengan demikian, AKSI Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola kebijakan keluarga yang mampu menjembatani perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara terpadu, guna mendorong percepatan pencapaian IPKK yang lebih merata dan berkelanjutan.

Prioritas Nasional 04 - Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA menjadi target indikator kinerja pembangunan perlindungan anak pada RPJMN dan RPJMD tahun 2025-2029, dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi perlindungan anak bagi Pemerintah Pusat atau Daerah. Semakin tinggi nilai capaian IPA, maka semakin baik capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia.

Penyusunan IPA mengacu pada dan terdiri atas lima (5) klaster Konvensi Hak Anak. Secara rinci, klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan (5 indikator); Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (4 indikator); Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan (8 indikator); Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang (5 indikator); dan Klaster V: perlindungan khusus (5 indikator).

Pada RPJMN Tahun 2025–2029, target IPA dipetakan secara bertahap dari 70,19 pada 2025 hingga mencapai 75,29 pada 2029. Sejalan dengan target RPJMN, capaian IPA telah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021 sampai 2024, namun capaian tersebut masih tergolong rendah dan belum mencerminkan keberhasilan pembangunan lintas sektor yang optimal. Secara rinci, capaian IPA bergerak dari 64,6 pada 2021, meningkat menjadi 71,02 pada 2024 atau mengalami kenaikan absolut sebesar 6,42 poin atau rata-rata +2,14 poin/tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam upaya perlindungan anak, tetapi laju kenaikan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar dampak kebijakan dirasakan lebih luas. Diperlukan peningkatan sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas layanan, dan pemantauan indikator yang lebih ketat agar capaian IPA tidak hanya naik secara kuantitatif tetapi juga mencerminkan kualitas perlindungan anak di lapangan.

Penetapan target IPA tahun 2025 sebesar 70,19 mengacu pada mekanisme yang telah disepakati dalam proses penyusunan RPJMN, yakni menggunakan capaian IPA tahun sebelumnya sebagai dasar pengukuran ketercapaian target. Mekanisme ini diterapkan mengingat data capaian IPA tahun berjalan baru tersedia pada akhir tahun berikutnya setelah melalui proses pengolahan dan verifikasi. Oleh karena itu, adanya perbedaan antara target tahun 2025 dan capaian tahun 2024 merupakan konsekuensi dari sistem pengukuran dan siklus ketersediaan data yang berlaku, serta tidak mencerminkan inkonsistensi dalam perencanaan. Penegasan ini penting

untuk memastikan pemahaman yang utuh di kalangan pemangku kepentingan mengenai kerangka evaluasi kinerja dan akuntabilitas pencapaian target IPA.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, telah dilaksanakan secara terstruktur melalui mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, program, serta kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan tersebut diarahkan untuk memastikan keterpaduan langkah dan konsistensi implementasi di seluruh tingkatan pemerintahan. Secara substantif, upaya yang dilakukan Kemenko PMK mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Penguatan kebijakan dan regulasi nasional melalui koordinasi penyusunan draf Rancangan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA) sebagai respons kebijakan atas meningkatnya kasus kekerasan, koordinasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD HI) 2025–2029 sebagai pedoman operasional lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak usia dini secara terintegrasi, pengawalan implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) dan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan terus dilakukan sebagai langkah strategis dalam merespons tantangan perlindungan anak di ruang digital, serta evaluasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI guna memperkuat landasan regulasi serta memastikan integrasi program lintas sektor berjalan lebih efektif.
2. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui penguatan respons kebijakan terhadap kekerasan anak baik di ranah luring maupun daring, serta mendorong penguatan tata kelola Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui sinkronisasi peran pusat dan daerah agar implementasi KLA lebih efektif dan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi implementasi di Daerah untuk mengidentifikasi praktik baik serta kendala implementasi kebijakan perlindungan anak di daerah, memperkuat integrasi data dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta mendorong pembentukan dan penguatan Gugus Tugas PAUD HI.
3. Transformasi digital tata kelola perlindungan anak melalui pengembangan Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Cerdas, Responsif, Inovatif, dan Adaptif Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (SISMONEV CERIA PAUD HI) berbasis kecerdasan buatan

(*Artificial Intelligence*). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, mendukung perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengendalian kebijakan. Dengan dukungan sistem digital yang terintegrasi, pengambilan keputusan menjadi lebih terukur, tepat sasaran, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan anak. Inisiatif ini menjadi pondasi penting dalam membangun tata kelola perlindungan anak yang modern, adaptif, dan berkelanjutan.

4. Respons terhadap isu strategis dan situasi darurat melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyediaan layanan ramah anak, serta perlindungan dari risiko kekerasan dan eksploitasi dalam situasi darurat.



Gambar 11. Menko PMK menghadiri kegiatan Deklarasi Bersama Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Ramah Anak

Dalam pelaksanaannya, upaya perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu:

1. Masih terdapat anak yang belum mengakses pendidikan secara berkelanjutan, terutama pada jenjang pendidikan menengah.
2. Masih tingginya angka prevalensi stunting pada balita.
3. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual.
4. Penyalahgunaan media sosial serta perundungan siber.
5. Masih maraknya perkawinan pada usia anak berimplikasi pada terhentinya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan bagi ibu dan anak, serta terbatasnya kesempatan anak untuk berkembang secara optimal.

Sebagai langkah tindak lanjut, keberhasilan mewujudkan Generasi Emas Indonesia sangat bergantung pada penguatan sinergi lintas sektor. Kedepannya, Kemenko PMK akan mengawal pelaksanaan sistem perlindungan anak yang komprehensif dengan akselerasi program kesehatan dan pendidikan yang adaptif. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan setiap kebijakan tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi terimplementasi secara nyata hingga ke tingkat akar rumput demi menjamin kualitas hidup anak Indonesia.

Prioritas Nasional 04 - Mobilitas Penduduk Lanjut Usia

Sebagai bagian krusial dari siklus hidup, kesejahteraan lanjut usia (lansia) menjadi fokus strategis Kemenko PMK yang dikawal melalui Indikator Mobilitas Lanjut Usia. Indikator tersebut merujuk pada ukuran statistik atas kemampuan seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia (60 tahun ke atas) untuk bergerak dan berpindah tempat secara mandiri guna melakukan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan fisik yang berarti, khususnya dalam berjalan serta naik dan turun tangga. Indikator ini diukur berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada tahun 2025, indikator Mobilitas Penduduk Lanjut Usia ditetapkan dengan target sebesar 94% dari *baseline* 92,94% pada tahun 2023 dan target di tahun 2029 sebesar 96%. Saat ini, capaian tahun 2025 masih dalam tahap konsolidasi data bersama Bappenas dan BPS, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan lansia.

Sepanjang tahun 2025, berbagai langkah pengawalan kebijakan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan guna mendukung pencapaian target tersebut. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui audiensi dan rapat koordinasi dengan Bappenas, BPS, serta kementerian teknis terkait, dengan tujuan menyelaraskan definisi, variabel, dan metodologi pengukuran mobilitas lansia agar semakin komprehensif dan inklusif. Di samping itu, penguatan lingkungan dan infrastruktur yang ramah lansia, pengembangan layanan perawatan jangka panjang yang terintegrasi, serta advokasi regulasi pemenuhan hak lansia terus didorong sebagai faktor kunci dalam meningkatkan mobilitas dan kemandirian lansia. Saat ini, tersedia kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas lansia, seperti indikator kawasan ramah lansia, Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sosial dan Kesehatan untuk lansia, serta program di kementerian/lembaga yang menysasar langsung ke lansia seperti Layanan

Lansia Terintegrasi (LLT), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) lansia, dan Lansia Berdaya (SiDAYA).

Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, diantaranya adalah UU Kesejahteraan Lanjut Usia dan Stranas yang masih dalam proses revisi, kekosongan lembaga koordinasi pasca pembubaran Komnas Lansia yang melemahkan fungsi advokasi dan pengawasan kebijakan, belum terintegrasinya data nasional yang masih tersebar di berbagai K/L, serta belum adanya standar nasional sistem perawatan jangka panjang (*long-term care*) yang menghubungkan ekosistem komunitas, Puskesmas, hingga Rumah Sakit melalui manajemen kasus yang terpadu.

Guna merespons tantangan tersebut, di tahun 2026 Kemenko PMK akan mengambil langkah percepatan melalui sinkronisasi ekosistem ekonomi perawatan dan perawatan jangka panjang, perluasan Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) yang melibatkan sinergi pentahelix, pelaksanaan kampanye kelanjutusiaan secara masif serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pencatatan data. Upaya ini selaras dengan visi pemerintah menjadikan lansia bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek pembangunan dengan memanfaatkan momentum bonus demografi kedua untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat melalui peningkatan usia harapan hidup yang berkualitas.

Prioritas Nasional 04 - Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas

Peningkatan mobilitas penduduk penyandang disabilitas merupakan bagian strategis dalam pelaksanaan Prioritas Nasional 4 RPJMN Tahun 2025 - 2029 yang menekankan pembangunan manusia inklusif dan berkeadilan. Mobilitas dimaknai sebagai perwujudan hak penyandang disabilitas untuk bergerak, berkomunikasi, dan berpartisipasi secara mandiri melalui dukungan aksesibilitas fisik, transportasi, informasi, serta komunikasi. Pemenuhan mobilitas menjadi prasyarat mendasar bagi terjaminnya akses setara terhadap pendidikan, layanan publik, serta kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.

Pada tahun 2025, capaian indikator mobilitas diproyeksikan mencapai 69 persen, meningkat dibandingkan *baseline* tahun 2023 sebesar 68,42 persen. Capaian tersebut masih bersifat outlook dan menunggu rilis resmi data Susenas. Peran Kemenko PMK dalam konteks ini difokuskan pada fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor guna memastikan berbagai program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan selaras dengan target nasional peningkatan mobilitas penyandang disabilitas.

Selama tahun 2025, Kemenko PMK melaksanakan rangkaian koordinasi kebijakan untuk memperkuat ekosistem pendukung mobilitas, antara lain melalui advokasi penerapan aksesibilitas universal, penguatan pendidikan inklusif, serta perluasan ekosistem bahasa isyarat sebagai bagian dari pemenuhan hak komunikasi. Upaya tersebut diarahkan untuk membangun lingkungan yang lebih ramah disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat menjalankan aktivitas secara lebih mandiri dan bermartabat.



Gambar 12. Menko PMK Memimpin Diskusi Interaktif Mengenai Bahasa Isyarat

Evaluasi pelaksanaan menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang memerlukan perhatian bersama. Pertama, keterbatasan penyediaan alat bantu mobilitas dan layanan fisioterapi atau rehabilitasi medik yang belum merata baik dari sisi cakupan maupun kualitas layanan. Kedua, aksesibilitas fasilitas umum, transportasi, dan gedung pemerintahan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip universal design. Ketiga, layanan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya responsif terhadap ragam kebutuhan penyandang disabilitas. Keempat, belum meratanya kebijakan dan regulasi daerah yang berpihak pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kelima, belum terbangunnya sistem data disabilitas yang terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Merespons tantangan tersebut, Kemenko PMK menetapkan beberapa langkah prioritas. Pertama, fasilitasi percepatan implementasi Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas sebagai kerangka integrasi program lintas sektor. Kedua, penguatan advokasi penerapan standar aksesibilitas universal pada sarana dan prasarana publik. Ketiga, penguatan kebijakan pendidikan inklusif dan pengembangan layanan bahasa isyarat untuk

memperluas akses komunikasi. Keempat, penyiapan kerangka koordinasi integrasi program alat bantu, rehabilitasi, dan layanan pendukung lainnya. Kelima, penguatan sinergi pusat dan daerah guna memastikan pemerataan intervensi dan keberlanjutan program.

Selain itu, Kemenko PMK mendorong penyelarasan perencanaan dan penganggaran lintas kementerian/lembaga agar lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis indikator juga terus dilakukan untuk memastikan setiap intervensi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, menegaskan peran Kemenko PMK sebagai orkestrator kebijakan pembangunan manusia yang inklusif, pengawasan berkelanjutan akan difokuskan pada penyelesaian *pending issue*, penguatan tata kelola lintas sektor, serta pemantauan berbasis data guna mendukung pencapaian target mobilitas 71% pada tahun 2029. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam seluruh aspek pembangunan nasional.

Program Prioritas 04.02 - *Early Childhood Development Index (ECDI)* pada Sektor Pemenuhan Hak Anak

Indeks Perkembangan Anak Usia Dini 2030 (ECDI 2030) merupakan indikator strategis nasional yang digunakan untuk mengukur capaian perkembangan anak usia 24–59 bulan dalam domain pembelajaran, kesehatan, dan kesejahteraan psikososial. Sejak bulan Januari 2025, ECDI2030 telah ditetapkan sebagai indikator pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 dan menjadi bagian dari Prioritas Nasional 4 tentang Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pengukuran ECDI 2030 terakhir dilakukan melalui hasil Pendataan Keluarga Tahun 2024 (PK-24), yang menunjukkan bahwa 87,7 persen anak usia 24–59 bulan berada dalam kategori berkembang sesuai tahap usia (*on-track*). Angka tersebut telah ditetapkan sebagai *baseline* dalam dokumen RPJMN 2025–2029. Pada tahun 2025 belum tersedia angka realisasi terbaru karena pengukuran ECDI selanjutnya dilakukan melalui integrasi ke dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mulai tahun 2025 sebagai mekanisme pengumpulan data tahunan.

Meskipun angka ECDI 2025 belum tersedia, indikator determinan perkembangan anak dari publikasi *Profil Anak Usia Dini 2025* memberikan gambaran kondisi pendukung kinerja. Persentase anak usia 0–5 bulan yang memperoleh ASI eksklusif tercatat sebesar 72,13 persen, sedangkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan sebesar

63,88 persen. Pada aspek pendidikan, partisipasi anak usia dini dalam pendidikan prasekolah baru mencapai 34,15 persen, meskipun tingkat partisipasi pembelajaran terorganisir satu tahun sebelum usia sekolah dasar telah mencapai 97,70 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa determinan perkembangan anak telah mengalami kemajuan pada beberapa aspek, namun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan imunisasi dasar lengkap yang berpengaruh langsung terhadap domain pembelajaran dan kesehatan dalam ECDI.

Dari sisi efisiensi, integrasi pengukuran ECDI ke dalam Pendataan Keluarga (PK-24) dan selanjutnya ke SUSENAS merupakan langkah strategis dalam optimalisasi sumber daya. Pendekatan ini menghindari duplikasi survei, memanfaatkan infrastruktur statistik nasional yang telah mapan, serta meningkatkan kualitas dan konsistensi data lintas waktu. Pengumpulan data melalui mekanisme yang telah berjalan secara nasional memungkinkan penghematan biaya operasional dibandingkan dengan penyelenggaraan survei mandiri. Selain itu, harmonisasi indikator nasional dengan standar global memperkuat kredibilitas data Indonesia dalam pelaporan SDGs.

Dari perspektif efektivitas intervensi, penggunaan data ECDI sebagai dasar perencanaan memungkinkan penajaman program pada kelompok yang paling membutuhkan. Misalnya, masih terdapat 10,67 persen anak usia dini yang belum memiliki akta kelahiran dan 11,67 persen yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya diukur dari besarnya alokasi, tetapi juga dari ketepatan sasaran intervensi.

Selain itu, fakta bahwa 38,82 persen anak usia dini mengalami keluhan kesehatan menunjukkan perlunya integrasi program promotif dan preventif secara lebih sistematis. Efisiensi akan meningkat apabila intervensi kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan dilaksanakan secara konvergen dalam kerangka PAUD Holistik Integratif.

Dengan demikian, tahun 2025 dapat dinilai sebagai periode penguatan tata kelola data dan konsolidasi kebijakan, yang dalam jangka menengah akan meningkatkan efisiensi belanja pembangunan anak usia dini melalui pendekatan berbasis bukti.

Meskipun capaian *baseline* ECDI 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Partisipasi pendidikan prasekolah yang masih berada pada angka 34,15 persen menunjukkan bahwa akses dan kualitas layanan PAUD belum merata. Kesenjangan ini berpotensi mempengaruhi kesiapan sekolah dan perkembangan kognitif anak pada jangka panjang.
2. Cakupan imunisasi dasar lengkap yang baru mencapai 63,88 persen masih berada di bawah tingkat yang diharapkan untuk membentuk kekebalan populasi yang optimal. Hal ini berimplikasi pada domain kesehatan dalam ECDI.
3. Faktor sosial ekonomi masih menjadi determinan penting. Persentase anak usia dini yang hidup dalam kemiskinan serta kesenjangan kepemilikan akta kelahiran antarwilayah menunjukkan bahwa aspek perlindungan dan kesejahteraan belum sepenuhnya merata.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2025 Kemenko PMK telah melakukan langkah-langkah strategis berupa penguatan sosialisasi ECDI2030 sebagai indikator pembangunan nasional, integrasi pengumpulan data ke dalam SUSENAS untuk pemantauan tahunan, serta penajaman intervensi pada kelompok 40 persen terbawah.

Ke depan, peningkatan kinerja ECDI diarahkan pada percepatan akses PAUD berkualitas, penguatan edukasi pengasuhan berbasis keluarga, peningkatan cakupan imunisasi dan layanan kesehatan dasar, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam kerangka PAUD Holistik Integratif. Pendekatan ini diharapkan mampu menurunkan proporsi anak yang belum berkembang optimal dan meningkatkan capaian ECDI secara bertahap selama periode RPJMN Tahun 2025–2029.

b. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

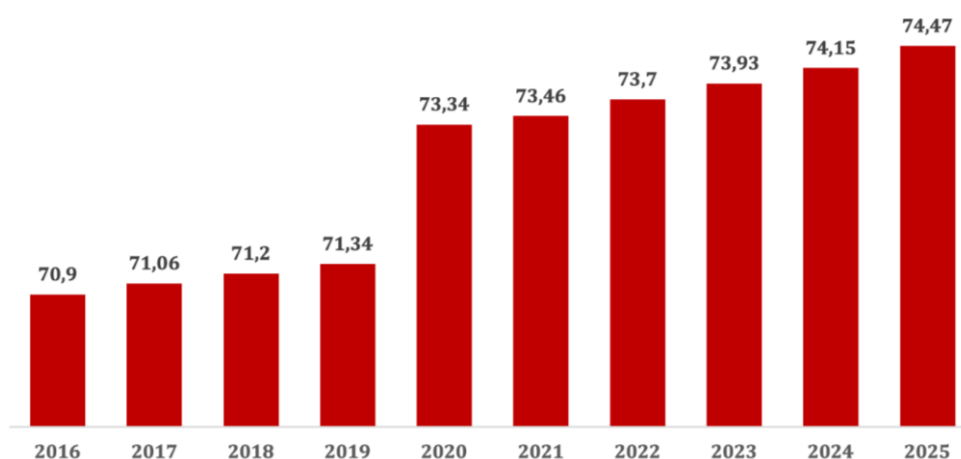
Prioritas Nasional 04 - Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola dan tingkat kematian menurut kelompok umur pada saat ini tetap berlaku. UHH merefleksikan dimensi umur panjang dan tingkat kesehatan masyarakat, serta menjadi indikator utama dalam menilai derajat kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup penduduk. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan gizi, serta efektivitas pembangunan manusia secara menyeluruh.

Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, UHH ditetapkan sebagai salah satu indikator prioritas dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. UHH menjadi tolok ukur keberhasilan berbagai intervensi lintas sektor, khususnya di bidang

kesehatan, termasuk pengendalian penyakit, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, perbaikan status gizi, serta peningkatan akses dan mutu layanan sosial dasar lainnya.

Perkembangan capaian UHH di Indonesia menunjukkan tren yang positif. UHH meningkat dari sekitar 69,8 tahun pada tahun 2010 dan terus mengalami kenaikan secara bertahap hingga diperkirakan mencapai sekitar 74,5 tahun pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan kualitas layanan kesehatan, status gizi, tingkat pendidikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.



Gambar 13. Tren Capaian UHH Tahun 2016-2025

Namun demikian, peningkatan angka UHH juga membawa tantangan baru, khususnya terkait dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia yang memerlukan kesiapan sistem pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta perencanaan sosial ekonomi yang lebih adaptif. Oleh karena itu, keberlanjutan peningkatan UHH perlu diiringi dengan penguatan kebijakan lintas sektor yang mampu menjawab dinamika perubahan struktur penduduk.

Data BPS menunjukkan bahwa angka UHH Indonesia mengalami peningkatan yang konsisten dalam sekitar 15 tahun terakhir. Pada tahun 2010, UHH rata-rata penduduk Indonesia tercatat sebesar 69,5 tahun. Lima tahun kemudian, pada tahun 2015, angka tersebut meningkat menjadi 71,0 tahun, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan kesehatan dasar dan perbaikan status gizi masyarakat. Tren peningkatan angka UHH terus berlanjut hingga tahun 2020 dengan capaian sebesar 72,5 tahun. Capaian ini mencerminkan perbaikan kualitas layanan kesehatan, penurunan angka kematian bayi, serta keberhasilan berbagai program pengendalian penyakit menular dan peningkatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2024 UHH Indonesia mencapai 74,15 tahun. Berdasarkan data yang dirilis BPS, angka UHH saat lahir pada tahun 2025

meningkat menjadi 74,47 tahun, atau naik sebesar 0,32 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan UHH yang berkelanjutan tersebut menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan, sekaligus menjadi indikator penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan sumber daya manusia sebagaimana diarahkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Peningkatan usia harapan hidup di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Perbaikan layanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Peningkatan gizi dan penurunan angka stunting yang berdampak langsung pada kualitas tumbuh kembang anak dan ketahanan tubuh masyarakat.
3. Keberhasilan pengendalian penyakit menular seperti TBC, malaria, dan HIV/AIDS, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
4. Kampanye GERMAS dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik, pola makan seimbang, serta pemeriksaan kesehatan rutin.
5. Kemajuan sosial dan ekonomi, termasuk peningkatan pendidikan, akses air bersih, dan perumahan layak yang turut mendukung kualitas hidup masyarakat.

Kemenko PMK melaksanakan berbagai upaya strategis dalam rangka mendukung pencapaian target UHH nasional. Sepanjang tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada penguatan peran koordinatif Kemenko PMK dalam menyinergikan kebijakan dan program lintas sektor di bidang kesehatan. Adapun kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi:

1. Sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan keselarasan kebijakan dan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan arah pembangunan nasional.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.



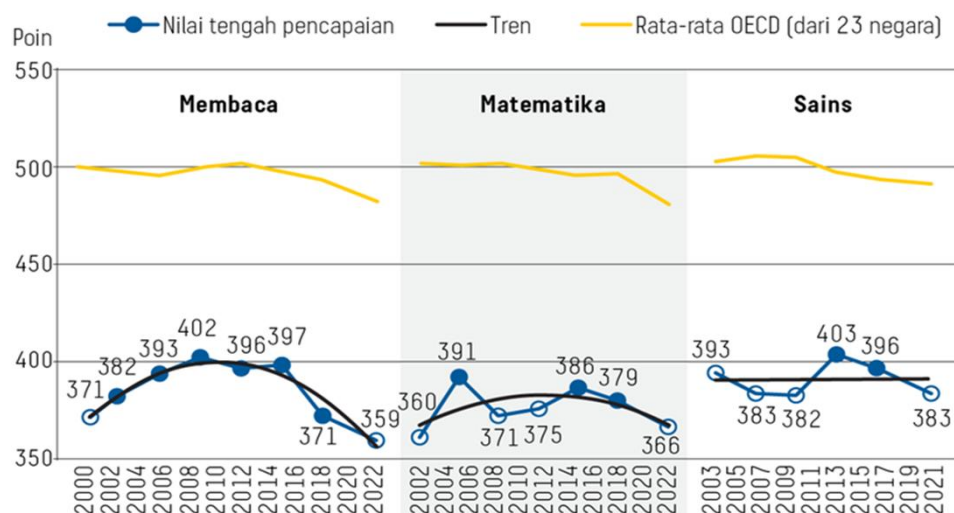
Gambar 14. Menko PMK dalam Kegiatan Cek Kesehatan Gratis pada 19 Agustus 2025 bersama Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai inisiatif strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit dan pencegahan faktor risiko kesehatan. Melalui penguatan sinergi lintas sektor serta keberlanjutan program strategis seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), peningkatan Usia Harapan Hidup penduduk Indonesia diharapkan tidak hanya tercermin secara kuantitatif, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan bermartabat, sejalan dengan sasaran RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045.

c. Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Prioritas Nasional 04 - Rata-rata Nilai PISA

Dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan dukungan keterampilan yang tinggi dari para generasi muda, terutama dari kalangan siswa dan pelajar. Sayangnya, skor keterampilan global yang diukur dalam *Programme for International Student Assessment* atau PISA belum menggambarkan kualitas generasi muda Indonesia yang bermutu tinggi. Rata-rata skor PISA merupakan indikator kunci untuk mengukur kualitas hasil pembelajaran pendidikan dasar dan menengah serta menjadi tolok ukur daya saing sumber daya manusia Indonesia. Capaian indikator ini berkontribusi langsung terhadap sasaran RPJMN bidang pembangunan manusia dan penguatan kualitas pendidikan.



Titik putih menunjukkan estimasi pencapaian rata-rata yang secara statistik tidak signifikan di atas/di bawah estimasi PISA 2022.
Garis hitam menunjukkan tren yang paling sesuai.

Gambar 15. Tren Capaian dalam Membaca, Matematika, dan Sains

Capaian PISA Indonesia menunjukkan pola fluktuatif dengan penurunan signifikan pada periode pandemi dan perbaikan pada periode terakhir. Dibandingkan dengan capaian internasional, posisi Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD dan beberapa negara di kawasan Asia, namun relatif sebanding dengan negara berpendapatan menengah lainnya. Kinerja rata-rata PISA Indonesia menunjukkan arah perbaikan yang positif, namun memerlukan akselerasi kebijakan yang lebih fokus, efektif, dan berbasis data agar target RPJMN dapat dicapai secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada jalur perbaikan, namun masih menghadapi banyak tantangan dalam peningkatan kompetensi berpikir tingkat tinggi peserta didik. Faktor yang mempengaruhi keterbatasan capaian indikator antara lain: (1) Kesenjangan kualitas pendidik dan sarana pembelajaran antar wilayah, (2) Dampak jangka panjang learning loss pasca pandemi, (3) Variasi kapasitas satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan nasional. Di sisi lain, faktor pendukung peningkatan kinerja meliputi implementasi Kurikulum Merdeka, penguatan Asesmen Nasional, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Capaian PISA Indonesia saat ini menegaskan bahwa tantangan utama pendidikan nasional bukan pada akses semata, melainkan pada mutu pembelajaran. Untuk mengejar target pembangunan SDM dan visi Indonesia Emas 2045, diperlukan transformasi kebijakan pendidikan yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil belajar nyata.

Pada Tahun 2025 ini menjadi tahun pelaksanaan *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Sejatinya, hasil PISA 2025 menjadi kabar yang sangat ditunggu karena menjadi cerminan kualitas sektor pendidikan nasional dan daya saing bibit muda Indonesia yang berusia 15 tahun secara global.

Prioritas Nasional 04 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2025 mengindikasikan bahwa secara rata-rata penduduk Indonesia telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP atau setara. Namun demikian, hasil ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun belum sepenuhnya tercermin pada capaian pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas, terutama akibat masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah serta keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertentu.

Selain itu, capaian kinerja nasional masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi. Sejumlah daerah telah mencatat RLS yang relatif tinggi, sementara sebagian daerah lainnya masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut mempengaruhi capaian agregat nasional dan menunjukkan perlunya penguatan intervensi yang lebih terarah.

Pemerintah akan berupaya agar ada peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah ke depan dan akan difokuskan pada penguatan akses dan kualitas pendidikan menengah, perluasan layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal bagi penduduk dewasa, serta penguatan program pencegahan putus sekolah, khususnya pada kelompok masyarakat rentan dan wilayah 3T. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator RLS secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan sumber daya manusia dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Prioritas Nasional 04 - Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun berdasarkan pola partisipasi sekolah yang berlaku. Indikator ini mencerminkan peluang akses pendidikan ke depan serta menjadi komponen utama dalam pengukuran kualitas pembangunan sumber daya manusia.

Pada tahun 2025, target HLS yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar 13,32 tahun, sementara realisasi kinerja mencapai 13,30 tahun. Dengan demikian, tingkat ketercapaian kinerja HLS tahun 2025 mencapai sekitar 99,85 persen, sehingga dikategorikan hampir tercapai. Selisih yang relatif kecil antara target dan realisasi menunjukkan bahwa peluang akses pendidikan secara umum telah berkembang sesuai dengan arah kebijakan nasional, meskipun masih memerlukan penguatan lanjutan.

Secara antarperiode, realisasi HLS menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari sekitar 13,21 tahun pada 2024 menjadi 13,30 tahun pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam partisipasi pendidikan di berbagai jenjang, khususnya pendidikan menengah, serta mulai pulihnya aktivitas pendidikan pasca pandemi. Tren positif ini mengindikasikan bahwa kebijakan perluasan akses pendidikan telah memberikan dampak yang konsisten dari tahun ke tahun.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun RPJMN 2025–2029, capaian HLS tahun 2025 telah berada pada jalur yang searah dengan sasaran jangka menengah, namun masih memerlukan percepatan agar target akhir RPJMN dapat tercapai secara optimal. Peningkatan HLS ke depan harus dijaga agar tidak melambat, terutama dengan memastikan keberlanjutan transisi peserta didik dari jenjang pendidikan dasar ke menengah dan lanjut.

Keberhasilan peningkatan HLS tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, kebijakan wajib belajar, serta dukungan program bantuan pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Namun demikian, capaian yang belum sepenuhnya optimal masih disebabkan oleh ketimpangan akses antar wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di daerah tertentu, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keberlanjutan sekolah.

Upaya yang telah dan akan dilakukan diarahkan pada penguatan akses pendidikan menengah, intervensi afirmatif di wilayah tertinggal, serta pengembangan pendidikan nonformal dan kesetaraan untuk memperluas peluang bersekolah. Selain itu, optimalisasi koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan anak usia sekolah tetap berada dalam sistem pendidikan.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan HLS tahun 2025 menunjukkan bahwa alokasi anggaran dan program pendidikan relatif efektif dalam memperluas akses pendidikan, tercermin dari kenaikan capaian dengan tambahan sumber daya yang terbatas. Ke depan,

peningkatan efisiensi akan difokuskan pada penajaman sasaran program, pemanfaatan data terpadu, serta penguatan sinergi pusat dan daerah agar setiap tambahan anggaran memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan HLS.

Prioritas Nasional 04 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja merupakan indikator yang menunjukkan daya serap pasar kerja terhadap angkatan kerja berpendidikan menengah (SMA/SMK) dan tinggi (Diploma-S3). Indikator ini penting untuk mengevaluasi relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dunia kerja.

Berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2025, proporsi pekerja berpendidikan menengah (menggabungkan lulusan SMA dan SMK) mencapai sekitar $21,19\% + 13,89\% = 35,08\%$ dari total pekerja, sedangkan proporsi pekerja berpendidikan tinggi (Diploma IV/S1-S3) mencapai $10,84\%$ dari total pekerja pada periode Agustus 2025. Secara agregat, sekitar $45,92\%$ tenaga kerja formal Indonesia pada 2025 memiliki pendidikan menengah dan tinggi. Realisasi di 2025 menunjukkan bahwa hampir setengah tenaga kerja telah berpendidikan menengah dan tinggi, meskipun belum mencapai rasio ideal yang diharapkan untuk menopang transformasi ekonomi berbasis kompetensi tinggi.

Secara historis, proporsi pekerja dengan pendidikan tinggi terus mengalami tren peningkatan dari tahun sebelumnya. Dibandingkan Agustus 2024, proporsi pekerja berpendidikan tinggi (Diploma IV/S1-S3) meningkat dari sekitar $12,82\%$ menjadi $13,06\%$ pada Agustus 2025. Ini menandakan adanya pergeseran struktur tenaga kerja menuju pendidikan yang lebih tinggi dari tahun ke tahun.

Keberhasilan peningkatan persentase pekerja berpendidikan menengah dan tinggi didorong oleh membaiknya akses pendidikan tinggi, perluasan kesempatan kerja di sektor formal tertentu serta meningkatnya pemulihan pasar kerja pascapandemi. Namun, kendala masih muncul berupa keterbatasan lapangan kerja yang sesuai kompetensi, ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, dan dominasi sektor informal yang cenderung menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah yang tidak memerlukan kualifikasi tinggi.

Pemerintah dan mitra pembangunan telah melaksanakan upaya seperti penguatan *link and match* pendidikan vokasi dengan dunia usaha, pengembangan program magang kerja, serta perluasan akses pendidikan tinggi dan pendidikan berkelanjutan. Untuk mendukung serapan lulusan

menengah dan tinggi yang lebih optimal, perlu dilanjutkan pengembangan insentif investasi pada sektor padat karya berteknologi menengah–tinggi, peningkatan kualitas kurikulum berbasis kompetensi industri, serta integrasi data pasar kerja untuk memetakan kebutuhan keterampilan secara *real-time*.

Capaian persentase pekerja berpendidikan menengah dan tinggi yang bekerja mencerminkan penggunaan sumber daya pendidikan dan ketenagakerjaan yang relatif efisien dalam mendorong partisipasi kerja bagi lulusan tersebut. Meski demikian, peningkatan efisiensi dalam penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja masih dapat diperkuat melalui kolaborasi sistematis antara K/L terkait, lembaga pendidikan, dan sektor industri agar setiap rupiah alokasi program pendidikan dan pelatihan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesesuaian dan penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi.

Prioritas Nasional 04 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (Diploma IV/S1–S3) merupakan indikator strategis untuk mengukur kualitas stok sumber daya manusia dan kesiapan Indonesia dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Indikator ini juga menjadi salah satu proksi utama dalam pencapaian sasaran RPJMN bidang pembangunan SDM.

Pada tahun 2025, realisasi proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi tercatat sebesar $\pm 11,0\%$, sementara target RPJMN tahun 2025 ditetapkan sebesar $\pm 11,5\%$. Dengan demikian, tingkat ketercapaian kinerja mencapai sekitar 95–96%, yang dikategorikan hampir tercapai. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang konsisten, meskipun masih terdapat kesenjangan kecil terhadap target yang ditetapkan.

Kinerja indikator ini menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan. Dibandingkan tahun sebelumnya (2024) yang berada pada kisaran $\pm 10,6\%$, terjadi peningkatan sekitar 0,3–0,4 poin persentase pada tahun 2025. Tren positif ini mencerminkan meningkatnya akses dan partisipasi pendidikan tinggi, sejalan dengan bertambahnya lulusan perguruan tinggi baru setiap tahun.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah RPJMN hingga akhir periode (2029) yang diarahkan pada kisaran $\pm 13\%$, capaian tahun 2025 telah mencapai sekitar 85% dari target akhir RPJMN. Hal ini

menunjukkan bahwa jalur pencapaian masih on track, namun memerlukan akselerasi kebijakan untuk menjaga konsistensi kenaikan tahunan.

Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja didorong oleh perluasan akses pendidikan tinggi, pengembangan perguruan tinggi di daerah, serta kebijakan afirmasi dan bantuan pembiayaan pendidikan. Namun demikian, laju peningkatan masih tertahan oleh faktor keterbatasan daya tampung perguruan tinggi berkualitas, disparitas wilayah, serta tantangan ekonomi rumah tangga yang mempengaruhi keberlanjutan studi penduduk usia produktif.

Pemerintah telah dan akan terus melakukan penguatan kebijakan perluasan akses pendidikan tinggi melalui peningkatan kapasitas perguruan tinggi, penguatan pendidikan vokasi dan terapan, serta perluasan skema bantuan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, sinergi dengan kebijakan ketenagakerjaan dan industri terus diperkuat untuk meningkatkan daya tarik dan relevansi pendidikan tinggi.

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan dan program peningkatan akses pendidikan tinggi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualifikasi pendidikan penduduk. Namun, peningkatan efisiensi masih dapat dilakukan melalui penajaman sasaran program, penguatan kualitas pembelajaran, serta optimalisasi kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta agar setiap peningkatan anggaran berkontribusi langsung terhadap kenaikan proporsi penduduk berpendidikan tinggi.

Prioritas Nasional 04 - Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional

Capaian Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional tahun 2025 menunjukkan performa yang solid dengan realisasi Literasi Membaca sebesar 62,12 dari target 62,89 serta Numerasi yang mencapai 54,01 dari target 54,36. Hasil ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga tren peningkatan mutu pembelajaran yang searah dengan sasaran strategis pembangunan sumber daya manusia unggul. Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh efektivitas kebijakan pembelajaran berbasis kompetensi serta penguatan kapasitas guru dalam mengimplementasikan metode pengajaran literasi dan numerasi yang lebih mendalam. Pemanfaatan hasil Asesmen Nasional sebagai instrumen diagnosis juga telah memberikan kontribusi besar dalam memastikan intervensi pendidikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik.

Rata-rata nilai Asesmen Nasional (AN) pada domain Literasi Membaca dan Numerasi merupakan indikator utama untuk mengukur capaian mutu pembelajaran peserta didik serta efektivitas kebijakan

peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana diarahkan dalam RPJMN bidang pembangunan SDM.

Pada tahun 2025, realisasi nilai rata-rata Literasi Membaca dan Numerasi menunjukkan capaian yang mendekati target kinerja tahunan yang ditetapkan. Secara umum, ketercapaian indikator berada pada kategori hampir tercapai, yang mencerminkan adanya perbaikan mutu pembelajaran, meskipun masih terdapat kesenjangan kecil terhadap target yang direncanakan.

Capaian tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik pada literasi membaca maupun numerasi. Peningkatan ini melanjutkan perbaikan bertahap sejak implementasi Asesmen Nasional sebagai pengganti Ujian Nasional, yang menitikberatkan pada kompetensi esensial dan berpikir tingkat tinggi. Namun demikian, laju peningkatan masih bersifat inkremental, belum menunjukkan akselerasi signifikan.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMN hingga akhir periode, capaian tahun 2025 telah berada pada jalur yang searah (*on track*), tetapi masih memerlukan penguatan intervensi agar target akhir RPJMN dapat tercapai secara optimal, khususnya pada satuan pendidikan dengan capaian rendah.

Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja didorong oleh kebijakan pembelajaran berbasis kompetensi, pemanfaatan hasil Asesmen Nasional untuk perbaikan satuan pendidikan, serta penguatan kapasitas guru melalui pelatihan. Namun, capaian belum optimal akibat disparitas mutu antarwilayah, variasi kualitas guru dan kepemimpinan sekolah, serta keterbatasan dukungan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi di lingkungan keluarga.

Pemerintah telah dan akan terus memperkuat intervensi berbasis data hasil AN, penguatan pembelajaran remedial dan diferensiasi, peningkatan kompetensi guru dalam pengajaran literasi dan numerasi, serta perluasan praktik baik melalui pendampingan satuan pendidikan. Fokus kebijakan diarahkan pada sekolah dan daerah dengan capaian terendah untuk memperkecil kesenjangan mutu.

Pelaksanaan Asesmen Nasional dinilai relatif efisien karena tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen diagnosis mutu pendidikan. Pemanfaatan hasil AN sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pembelajaran memungkinkan optimalisasi anggaran pendidikan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik.

Prioritas Nasional 04 - Peringkat Indeks Inovasi Global

Indeks Inovasi Global (*Global Innovation Index/GII*) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur daya saing inovasi nasional yang mencerminkan kinerja sistem riset, pengembangan teknologi, dan inovasi. Dalam tahun 2025, pemerintah menetapkan target peningkatan peringkat GII Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra K/L, dengan sasaran mendorong Indonesia masuk ke dalam kelompok 40 besar dunia.

Hingga akhir tahun pelaporan, realisasi peringkat GII Indonesia masih berada peringkat 55, sehingga kinerja indikator ini belum sepenuhnya mencapai target tahun 2025, yaitu 53. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan ekosistem inovasi nasional telah memberikan hasil, namun belum cukup untuk menutup kesenjangan terhadap sasaran strategis yang ditetapkan.

Peringkat GII Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun awal periode RPJMN, yang sebelumnya berada di kisaran peringkat 80-an. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir laju peningkatan peringkat cenderung melambat, yang mengindikasikan perlunya akselerasi kebijakan inovasi yang lebih terfokus pada penciptaan *output* dan *outcome*.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah RPJMN, realisasi capaian hingga tahun berjalan belum selaras dengan arah kebijakan pembangunan inovasi nasional, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas output inovasi dan pemanfaatannya oleh sektor industri. Kesenjangan kinerja ini menjadi sinyal perlunya penguatan sinergi lintas sektor dan peningkatan efektivitas intervensi kebijakan.

Capaian kinerja menunjukkan bahwa peningkatan peringkat GII Indonesia didukung oleh penguatan tata kelola riset nasional, peningkatan belanja riset dan pengembangan, serta perluasan infrastruktur pendukung inovasi. Sebaliknya, faktor penyebab belum optimalnya kinerja antara lain rendahnya tingkat hilirisasi hasil riset, keterbatasan keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan R&D, fragmentasi program riset, serta belum optimalnya kebijakan insentif inovasi yang berorientasi pasar.

Pelaksanaan program dan kegiatan inovasi menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup, namun capaian output dan outcome yang dihasilkan belum sepenuhnya sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, fokus pendanaan pada program prioritas, serta penguatan mekanisme evaluasi kinerja berbasis hasil.

Pemerintah akan melakukan penguatan pendanaan riset berbasis outcome, peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi R&D industri, percepatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset, serta penguatan kolaborasi riset dan inovasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan mitra internasional. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan mempercepat pencapaian target kinerja Indeks Inovasi Global pada periode perencanaan berikutnya.

Program Prioritas 04.01 - Tingkat Penyelesaian Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu, tanpa memperhatikan apakah mereka sesuai dengan usia resmi untuk jenjang tersebut.

Untuk jenjang SMA/SMK/ sederajat, APK menggambarkan persentase penduduk usia 16– 18 tahun yang sedang bersekolah di SMA, SMK, MA, dan bentuk pendidikan menengah lainnya terhadap jumlah penduduk usia 16– 18 tahun. angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) di tingkat SMA/SMK, dengan fokus pada cara untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah, terutama di daerah terpencil yang sering terjadi kesenjangan. Nilai APK dapat melebihi 100% apabila terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah formal (lebih muda atau lebih tua) yang masih bersekolah di jenjang SMA/SMK/ sederajat.

Kinerja Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Sederajat) hingga tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Target kebijakan diarahkan pada peningkatan proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan menengah sebagai fondasi penguatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja. Hingga akhir tahun pelaporan, realisasi tingkat penyelesaian pendidikan menengah masih berada di atas target 2025, sehingga ketercapaian target dinilai baik.

Tingkat penyelesaian pendidikan menengah menunjukkan perbaikan yang relatif konsisten dibandingkan awal periode RPJMN. Kebijakan perluasan akses pendidikan menengah, bantuan operasional sekolah, dan program afirmasi bagi kelompok rentan berkontribusi terhadap peningkatan capaian tersebut. Namun, laju peningkatan dalam beberapa tahun terakhir cenderung melambat, terutama di wilayah dengan kondisi sosial-ekonomi yang lebih rentan.

Jika dibandingkan dengan target RPJMN, realisasi hingga tahun berjalan belum sepenuhnya selaras dengan sasaran pendidikan menengah universal. Kesenjangan capaian masih terlihat pada jenjang SMK dan MA, serta di daerah tertinggal, perdesaan, dan wilayah dengan angka putus sekolah yang relatif tinggi, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.

Peningkatan capaian didukung oleh kebijakan wajib belajar, perluasan akses sekolah, serta dukungan bantuan pendidikan. Sebaliknya, tantangan utama meliputi tekanan ekonomi rumah tangga, kebutuhan bekerja pada usia sekolah, keterbatasan akses sekolah lanjutan di wilayah tertentu, serta masih terbatasnya relevansi pendidikan, khususnya pada jenjang SMK, terhadap kebutuhan dunia kerja.



Gambar 16. Menko PMK Mengoordinasikan Infrastruktur Sekolah Terintegrasi

Pemerintah perlu memperkuat program bantuan dan beasiswa pendidikan, memperluas layanan pendidikan menengah berbasis wilayah, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi, serta mengoptimalkan jalur pendidikan nonformal dan kesetaraan sebagai alternatif penyelesaian pendidikan menengah. Upaya ini diarahkan untuk mempercepat pencapaian target nasional dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Untuk mempercepat peningkatan APK jenjang SMA/SMK/ sederajat, Kemenko PMK telah melaksanakan berbagai sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian, antara lain:

1. Pembangunan dan rehabilitasi Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) guna memperluas daya tampung.

2. Peningkatan akses pendidikan vokasi melalui penguatan peran SMK berbasis potensi daerah dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
3. Pemberian bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).
4. Optimalisasi sistem zonasi untuk pemerataan akses sekolah menengah di setiap kabupaten/kota.

Sedangkan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Indonesia tercatat di angka 32,89% (Laki-laki: 29,88%, Perempuan: 35,98). Pencapaian ini mencerminkan kenaikan bertahap dari tahun-tahun sebelumnya (tahun 2024 berada di 32,00%). Angka ini menunjukkan adanya selisih sebesar 1,05% dari target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN) yaitu 33,94%. Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang inklusif, Kemenko PMK mendorong perlunya strategi nasional untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi hingga 38,04% pada 2029, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Program Prioritas 04.01 - Jumlah Anak Tidak Sekolah Usia 6-18 Tahun

Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 6–18 tahun merupakan indikator strategis dalam mengukur efektivitas pelaksanaan wajib belajar dan pemerataan akses pendidikan. Dalam RPJMN, pemerintah menargetkan penurunan signifikan jumlah ATS sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan ketimpangan sosial.

Pada tahun 2025, kinerja penurunan jumlah ATS menunjukkan tren perbaikan, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data pemantauan, terdapat penurunan yang cukup berarti dari angka baseline sebesar 4.185.957 jiwa. Meskipun capaian pada tahun 2025 telah menyentuh angka 3.065.590 jiwa, realisasi ini masih menyisakan kesenjangan terhadap target RPJMN yang ditetapkan sebesar 3.776.239 jiwa (dalam konteks target batas maksimal atau sasaran penurunan), khususnya pada kelompok usia pendidikan menengah (15–18 tahun).

Jumlah ATS mengalami penurunan bertahap dibandingkan awal periode RPJMN. Penurunan ini mencerminkan dampak positif dari kebijakan bantuan pendidikan, perluasan layanan pendidikan formal dan nonformal, serta penguatan basis data sasaran. Namun demikian, laju

penurunan ATS cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi tinggi.

Jika dibandingkan dengan target RPJMN, realisasi hingga tahun berjalan belum sepenuhnya selaras dengan sasaran pengurangan ATS secara berkelanjutan. Tantangan terbesar masih terdapat pada anak usia SMA/SMK/MA/ sederajat, yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi rumah tangga, kebutuhan bekerja, serta keterbatasan akses dan relevansi pendidikan.

Keberhasilan penurunan ATS didukung oleh program bantuan sosial dan pendidikan, perluasan pendidikan kesetaraan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan ekonomi keluarga, kebutuhan bekerja pada usia sekolah, mobilitas penduduk, keterbatasan layanan pendidikan di wilayah tertentu, serta risiko putus sekolah pada masa transisi jenjang pendidikan.

Intervensi penanganan ATS menunjukkan efisiensi yang cukup, terutama melalui integrasi data sasaran dan sinergi lintas sektor. Namun, capaian penurunan ATS belum sepenuhnya sebanding dengan sumber daya yang digunakan, sehingga diperlukan penajaman sasaran berbasis wilayah, penguatan pendekatan preventif, serta monitoring dan evaluasi berbasis hasil.

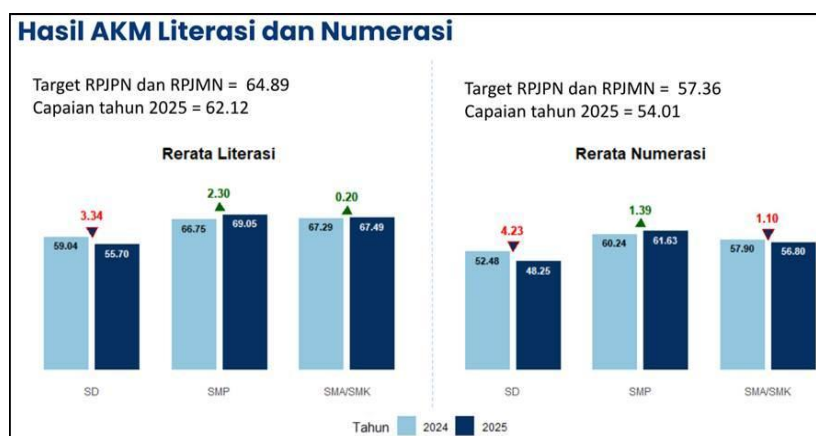
Program Prioritas 04.02 - Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional

Dalam rangka memenuhi mandat konstitusional untuk menyediakan pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, Kemenko PMK telah mendorong Kemendikdasmen menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA). Peraturan yang telah diundangkan pada tanggal 3 Juni 2025 ini, menjadi momen penting dalam upaya penguatan sistem penilaian capaian akademik yang terstandar, objektif, dan inklusif di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Regulasi tersebut dijadikan sebagai dasar hukum Pelaksanaan dan penetapan standar kompetensi, kisi-kisi dan struktur soal nasional, pengembangan sistem digital, kesiapan teknis, dan infrastruktur serta sosialisasi dan pelatihan.

Dalam implementasinya, TKA dapat diikuti oleh murid dari berbagai jalur pendidikan, termasuk jalur formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK), jalur non formal (program paket A, B, dan C), serta jalur informal. Peserta TKA akan menerima hasil berupa nilai dan kategori capaian yang ditetapkan secara nasional. Murid dari jalur formal dan non formal yang telah mengikuti TKA berhak memperoleh sertifikat hasil TKA.

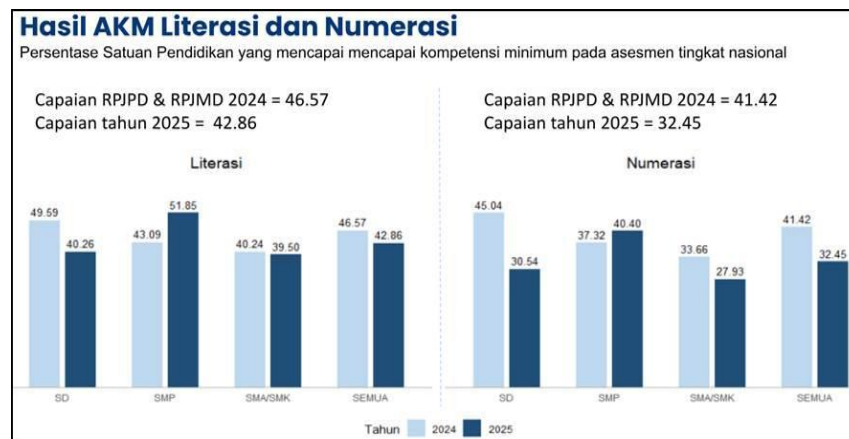
Adapun hasil TKA memiliki fungsi strategis dalam mendukung berbagai kebijakan pendidikan, yakni 1) sebagai dasar seleksi jalur prestasi dalam penerimaan murid baru tingkat SMP, SMA dan SMK; 2) menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi; 3) mendukung penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik dari jalur nonformal dan informal; 4) menjadi referensi dalam proses seleksi akademik lainnya, serta 5) menjadi acuan penting dalam sistem pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2025 diikuti oleh 287.229 satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik yang berpartisipasi sebanyak 6.768.823 siswa. Hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) tahun 2025 untuk literasi adalah 62,12 (target RPJMN 64,89) sedangkan untuk numerasi adalah 54,01 (target RPJMN 57,36). Bila dibandingkan dengan hasil AKM tahun 2024, terjadi penurunan baik literasi maupun numerasi. Bila dirinci ke setiap jenjang, untuk literasi terjadi kenaikan untuk jenjang SMP dan SMA sementara untuk jenjang SD terjadi penurunan. Untuk numerasi, hanya jenjang SMP yang mengalami kenaikan, sementara jenjang SD dan SMA terjadi penurunan.



Gambar 17. Hasil AKM Literasi dan Numerasi

Sedangkan Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada Asesmen Tingkat Nasional tahun 2025 untuk literasi adalah 42,86 dan untuk numerasi adalah 32,45. Capaian ini turun dari capaian tahun 2024 dimana untuk literasi adalah 46,57 dan untuk numerasi adalah 41,42.



Gambar 18. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai kompetensi minimum AKM Literasi dan Numerasi

Program Prioritas 04.02 - *Early Childhood Development Index (ECDI)* pada Sektor Pendidikan

ECDI merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur perkembangan anak usia dini. Instrumen ini dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan UNICEF dan dukungan dari Tanoto Foundation. ECDI bertujuan untuk mengukur capaian perkembangan anak usia 24-59 bulan dalam dimensi kemampuan literasi-numerasi, kemampuan fisik, kemampuan kognitif, kemampuan sosial-emosional, dan kemampuan belajar.

Di Indonesia, komitmen terhadap ECDI berakar kuat pada visi untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Secara legal, pondasi utama kebijakan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI). Perpres ini menegaskan bahwa kebutuhan anak tidak boleh dipenuhi secara parsial; pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan harus diberikan secara terpadu.

Data dari ECDI inilah yang kemudian digunakan oleh pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam PP No. 2 Tahun 2018. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap anak mendapatkan akses layanan PAUD yang berkualitas, karena capaian ECDI yang tinggi merupakan sinyal bahwa layanan dasar di daerah tersebut telah berjalan dengan baik.

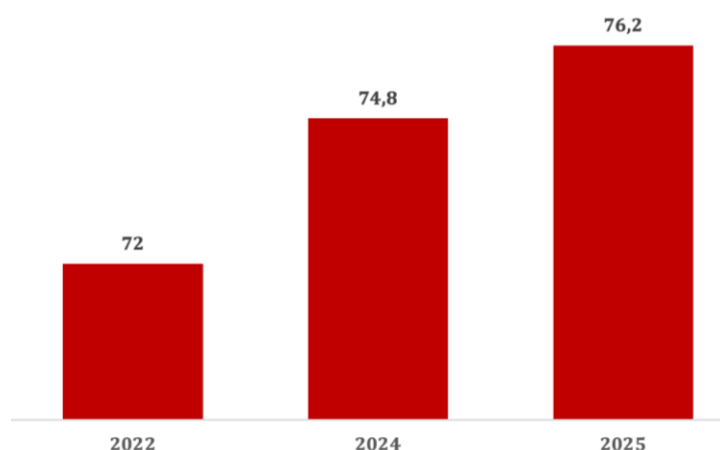
Berdasarkan data pemantauan nasional hingga akhir tahun 2025, Indonesia mencatatkan kemajuan yang signifikan dalam ECDI atau Indeks Perkembangan Anak Usia Dini. Skor ECDI nasional berhasil melampaui angka 76%. Artinya, lebih dari tiga perempat anak usia dini di Indonesia telah memenuhi standar perkembangan minimal pada domain kesehatan,

pembelajaran, dan psikososial. Terjadi peningkatan sekitar 3-4% dibandingkan data dasar tahun 2021/2022, yang menunjukkan efektivitas intervensi gizi dan pendidikan anak usia dini yang masif selama periode 2024-2025.

Berdasarkan pemantauan nasional, berikut adalah detail angka yang menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam melampaui standar minimal.

Tabel 12. Capaian ECDI Nasional (2025)

Indikator	Target	Capaian
ECDI	75,5%	76,2%
a. Domain Kesehatan	85,0%	88,4%
b. Domain Pembelajaran	72,0%	74,1%
c. Domain Psikososial	65,0%	66,1%



Gambar 19. Tren Skor Indeks ECDI (%) Tahun 2022-2025

Keberhasilan sangat tergantung bagaimana pelaksanaan aktivitas kunci: 1) dibutuhkan pendataan anak usia 3-6 tahun yang belum atau tidak masuk atau mendapat akses di PAUD; 2) bantuan bagi peserta didik usia 5-6 tahun (RO baru PIP PAUD di 2026); 3) Penambahan kapasitas satuan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun; 4) Pemenuhan kebutuhan pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/DIV, Prioritas guru PAUD formal sampai 2029.

Tantangan yang ada meskipun secara nasional sukses, kemenko PMK masih mencatat masih adanya disparitas wilayah. Skor ECDI di wilayah perdesaan dan daerah 3T masih tertinggal sekitar 10-15% dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut 2026 akan

difokuskan pada perluasan layanan PAUD HI di bidang pendidikan, pengasuhan, dan kesehatan untuk wilayah 3T.

Program Prioritas 04.04 - Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indikator Kualitas Pembelajaran dengan Kategori Baik

Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan kebijakan peningkatan mutu pembelajaran. Indikator ini mencerminkan kualitas proses belajar mengajar, kompetensi pendidik, kepemimpinan pembelajaran, serta pemanfaatan hasil asesmen sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 62,4%, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 59,1%. Dengan target tahun 2025 sebesar 65,0%, tingkat ketercapaian indikator mencapai 96,0%, sehingga kinerja dikategorikan cukup tinggi namun belum sepenuhnya mencapai target.

Capaian indikator menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan peningkatan kompetensi guru, penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, serta pemanfaatan hasil Asesmen Nasional mulai berdampak positif terhadap mutu proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Jika dibandingkan dengan target RPJMN, capaian tahun 2025 masih berada sedikit di bawah sasaran nasional, yang menargetkan peningkatan mutu pembelajaran secara lebih merata di seluruh wilayah. Kesenjangan capaian antarwilayah masih terlihat, khususnya antara wilayah perkotaan dan wilayah dengan keterbatasan sumber daya pendidikan.

Kinerja menunjukkan bahwa peningkatan capaian indikator didukung oleh Implementasi Kurikulum Merdeka yang semakin meluas, Program peningkatan kompetensi guru berbasis kebutuhan dan Pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai alat perencanaan sekolah. Beberapa hambatan yang timbul antara lain Kesenjangan kapasitas guru dan kepala sekolah antarwilayah, Keterbatasan pendampingan pembelajaran yang berkelanjutan dan Beban administratif pendidik yang mengurangi fokus pada pembelajaran.

Program peningkatan mutu pembelajaran telah memanfaatkan skema pelatihan daring dan integrasi data Asesmen Nasional, sehingga relatif efisien. Namun, peningkatan capaian indikator belum sepenuhnya sebanding dengan alokasi sumber daya, sehingga diperlukan penajaman sasaran dan penguatan intervensi berbasis satuan pendidikan dengan capaian terendah.

Program Prioritas 04.19 - Persentase Penduduk dengan Pendidikan Minimal SMA

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pendidikan, khususnya pada jenjang menengah, memegang peranan krusial sebagai jembatan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau langsung memasuki dunia kerja. Kemenko PMK secara konsisten mengawal berbagai kebijakan dan program untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata, dengan fokus pada peningkatan persentase penduduk yang menamatkan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Pada tahun 2025, berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan minimal SMA atau sederajat mencapai 30,85%. Angka ini menunjukkan bahwa lulusan SMA/SMK sederajat masih mendominasi struktur pendidikan di Indonesia. Meskipun terdapat peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, capaian ini menjadi refleksi sekaligus pemicu bagi Kemenko PMK untuk terus mendorong akselerasi peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 secara eksplisit mengarahkan pada penguatan modal manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk jenjang SMA/sederajat, sebagai fondasi awal menuju pendidikan tinggi dan pasar kerja yang kompetitif.

Upaya peningkatan persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA tidak lepas dari berbagai tantangan. Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), masih menjadi pekerjaan rumah. Selain itu, relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, serta kualitas tenaga pendidik, juga memerlukan perhatian serius. Kemenko PMK, sebagai koordinator lintas sektor, mengambil peran strategis dalam merumuskan dan menyelaraskan kebijakan untuk mengatasi tantangan ini.

Pada tahun 2025, Kemenko PMK fokus pada beberapa strategi kunci:

1. Penguatan Tata Kelola Data Pendidikan: Melalui inisiatif seperti "Satu Data Pendidikan", Kemenko PMK berupaya mengorkestrasi data dari berbagai kementerian/lembaga untuk menghasilkan profil data anak Indonesia yang akurat. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti, terutama dalam mengidentifikasi anak-anak yang belum sekolah atau berisiko putus sekolah.
2. Program Sekolah Terintegrasi (SMA Unggul Garuda): Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pendidikan menengah yang inklusif dan berkualitas, dengan target melahirkan lulusan yang siap

bersaing di universitas terbaik dunia dan menjadi motor penggerak iptek nasional. Melalui skema sekolah baru dan upgrade sekolah eksisting, program ini berupaya mengatasi kesenjangan kualitas dan akses.

3. Revitalisasi Pendidikan Vokasi: Kemenko PMK terus mendorong revitalisasi pendidikan vokasi untuk memastikan lulusan SMA/SMK memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran usia produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Penyusunan Regulasi Pendukung: Kemenko PMK menginisiasi dan mengawal penyusunan regulasi seperti Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kuat bagi percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan.

Kemenko PMK menyadari bahwa peningkatan persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA bukan sekadar target kuantitatif, melainkan investasi jangka panjang dalam kualitas SDM bangsa. Melalui koordinasi yang intensif, sinergi lintas kementerian, dan implementasi program-program strategis, Kemenko PMK berkomitmen untuk terus mengawal upaya ini. Dengan fondasi pendidikan menengah yang kuat, kita optimis dapat mencetak generasi yang berdaya saing global, inovatif, dan berkarakter, siap membawa Indonesia menuju puncak kejayaan di tahun 2045.

d. Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
Prioritas Nasional 04 - Jumlah Perolehan Medali Emas pada *Olympic Games*

Jumlah Perolehan Medali Emas Olimpiade merupakan salah satu indikator strategis dalam RPJMN 2025–2029 yang tercantum dalam Lampiran III RPJMN Kemenko PMK. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui peningkatan prestasi olahraga nasional serta daya saing atlet Indonesia di tingkat global.

Dalam kerangka tugas dan fungsi Kemenko PMK, indikator perolehan medali emas Olimpiade berperan sebagai instrumen koordinatif lintas kementerian/lembaga dalam perumusan, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembinaan olahraga prestasi. Kemenko PMK memastikan keterpaduan kebijakan antara pembinaan atlet, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta dukungan iptek dan sport science agar pembangunan olahraga prestasi berjalan secara holistik dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025 tidak terdapat penyelenggaraan *Olympic Games*, sehingga capaian indikator pada tahun tersebut berfungsi sebagai baseline dan fase konsolidasi kebijakan. *Olympic Games* berikutnya akan

diselenggarakan pada tahun 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat, yang menjadi fokus utama pencapaian target dalam periode RPJMN 2025–2029.

Baseline indikator ditetapkan sebesar 2 medali emas, mengacu pada capaian Indonesia pada Olimpiade Paris 2024. Berdasarkan baseline tersebut, target perolehan medali emas pada Olimpiade Los Angeles 2028 ditetapkan sebesar 4–6 medali emas. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga melalui penguatan sistem pembinaan atlet elite, pemusatan latihan jangka panjang, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, serta penguatan ekosistem olahraga prestasi.

Tabel 13. Capaian Medali Tim Indonesia pada 3 Olympic Edisi sebelumnya

Tahun	Tuan Rumah	Target	Capaian
2016	Rio de Janeiro, Brazil	1 emas peringkat 40 besar	1 emas, 2 perak peringkat 46
2020	Tokyo, Jepang	perbaikan dari peringkat sebelumnya	1 emas, 1 perak, 3 perunggu peringkat 55
2024	Paris, Perancis	menambah perolehan medali sebelumnya	2 emas, 1 perunggu Peringkat 39

Melalui peran koordinatif Kemenko PMK, indikator ini menjadi dasar pengendalian dan evaluasi kinerja lintas sektor, sekaligus memastikan seluruh program dan intervensi terkait pembinaan olahraga prestasi berkontribusi secara terukur terhadap pencapaian target medali emas Olimpiade 2028.

Prioritas Nasional 04 - Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games

Penyelenggaraan Paralympic Games juga dilaksanakan pada tahun 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat, sehingga pada tahun 2025 belum terdapat pelaksanaan ajang tersebut. Oleh karena itu, indikator jumlah perolehan medali emas Paralympic Games yang tercantum dalam Lampiran III RPJMN Kemenko PMK 2025–2029 diposisikan sebagai indikator strategis jangka menengah yang capaian utamanya diukur pada tahun 2028.

Perolehan medali emas Paralympic Games menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan olahraga disabilitas, sekaligus mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip inklusivitas,

kesetaraan kesempatan, dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas dalam bidang olahraga prestasi. Dalam pelaksanaannya, indikator ini juga berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas pembinaan atlet paralimpik nasional yang berkelanjutan.

Baseline indikator ditetapkan sebesar 1 medali emas, mengacu pada capaian Indonesia pada Paralympic Games sebelumnya di Paris (2024), di mana Indonesia juga mencatatkan rekor perolehan jumlah medali terbanyak sepanjang keikutsertaan Paralympic Games, dengan raihan 1 emas, 8 perak, dan 5 perunggu, serta menempati peringkat 50 klasemen akhir. Capaian tersebut menunjukkan tren positif pembinaan olahraga disabilitas nasional dan menjadi landasan yang kuat untuk peningkatan prestasi ke depan.

Berdasarkan baseline tersebut, pemerintah menetapkan target perolehan 4–6 medali emas pada Paralympic Games Los Angeles 2028. Target ini dirumuskan secara progresif namun realistis, dengan mempertimbangkan penguatan sistem pembinaan atlet paralimpik, peningkatan kualitas layanan sport science dan sport medicine yang adaptif, penyediaan sarana dan prasarana yang inklusif, serta peningkatan kesejahteraan atlet.

Dalam konteks tugas dan fungsi Kemenko PMK, indikator perolehan medali emas Paralympic Games menjadi bagian dari peran koordinatif dalam mensinergikan kebijakan lintas kementerian/lembaga, termasuk Kemenpora, NPC Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya. Kemenko PMK memastikan agar seluruh intervensi kebijakan dan program pembinaan olahraga disabilitas berjalan terpadu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target Paralympic Games 2028 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.

Tabel 14. Capaian Medali Tim Indonesia pada 3 Paralympic Edisi sebelumnya

Tahun	Tuan Rumah	Target	Capaian
2016	Rio de Janeiro, Brazil	1 medali peringkat 40 besar	1 perunggu peringkat 76
2020	Tokyo, Jepang	1 emas, 1 perak, 3 perunggu	2 emas, 3 perak, 4 perunggu peringkat 48
2024	Paris, Perancis	1 emas, 2 perak, 3 perunggu	1 emas, 8 perak, 5 perunggu Peringkat 50

Prioritas Nasional 04 - Peringkat pada Asian Games

Indikator peringkat pada Asian Games dalam RPJMN 2025–2029 merupakan indikator kinerja yang merefleksikan daya saing olahraga Indonesia pada level elite Asia, sekaligus menjadi proksi posisi strategis Indonesia dalam peta kekuatan olahraga kawasan Asia. Indikator ini berorientasi pada outcome kompetitif yang dipengaruhi oleh konsentrasi sumber daya, kualitas pembinaan cabang unggulan, serta efektivitas strategi nasional dalam menghadapi persaingan antarnegara.

Pada Tahun 2025, belum terdapat capaian kinerja indikator peringkat Asian Games karena penyelenggaraan ajang tersebut baru akan berlangsung pada Tahun 2026. Dengan demikian, Tahun 2025 diposisikan sebagai fase akselerasi kinerja, di mana kebijakan difokuskan pada optimalisasi cabang olahraga prioritas dan konsolidasi kekuatan atlet elit nasional untuk menghadapi kompetisi dengan tingkat intensitas tinggi.

Secara historis, capaian Indonesia pada Asian Games menunjukkan fluktuasi yang kuat, terutama dipengaruhi oleh faktor status tuan rumah dan perubahan struktur cabang serta nomor pertandingan. Pada Asian Games 2022 di Tiongkok yang dilaksanakan pada Tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-13, yang kemudian ditetapkan sebagai baseline Tahun 2024 dalam RPJMN 2025–2029. Peningkatan target menuju peringkat 9–11 pada Tahun 2026 merepresentasikan target improvement sebesar 2–4 peringkat, yang dinilai realistis dan terukur yang mencerminkan posisi kompetitif Indonesia pada kondisi normal tanpa keunggulan struktural sebagai tuan rumah.

Dalam konteks tersebut, penetapan target peringkat 9–11 pada Tahun 2026 dirancang sebagai strategi reposisi Indonesia ke kelompok menengah-atas Asia, bukan sebagai upaya lonjakan peringkat yang bersifat spekulatif. Target ini merepresentasikan peningkatan kinerja yang terukur dengan asumsi peningkatan efisiensi pembinaan, fokus pada cabang unggulan, serta optimalisasi peluang medali pada nomor-nomor dengan tingkat kompetisi yang relatif dapat bersaing.

Penetapan rentang target 9–11 juga mempertimbangkan struktur kompetisi Asian Games yang sangat terkonsentrasi pada sejumlah negara dominan dengan kapasitas investasi olahraga yang besar dan relatif stabil. Dalam konfigurasi tersebut, ruang peningkatan peringkat Indonesia secara objektif berada pada segmen negara-negara kompetitif menengah, sehingga pendekatan bertahap dipilih untuk menjaga kredibilitas target RPJMN.

Tabel 15. Capaian Peringkat dan Medali Asian Games pada 3 Edisi

Tahun	Tuan Rumah	Target	Capaian
2014	Korea Selatan	9 emas peringkat 10 besar	4 emas, 5 perak, 11 perunggu peringkat 17
2018	Indonesia	16 emas peringkat 10 besar	31 emas, 24 perak, 43 perunggu peringkat 4
2022	China	peringkat 12 besar	7 emas, 11 perak, 18 perunggu Peringkat 13

Prioritas Nasional 04 - Peringkat pada Asian Para Games

Indikator peringkat pada Asian Para Games merupakan indikator kinerja utama dalam RPJMN 2025–2029 yang tidak hanya merefleksikan prestasi olahraga, tetapi juga menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan olahraga yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi atlet penyandang disabilitas. Indikator ini memiliki dimensi strategis yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak, kesetaraan akses, serta kualitas layanan pembinaan olahraga disabilitas nasional.

Pada Tahun 2025, belum terdapat capaian kinerja untuk indikator peringkat Asian Para Games, mengingat penyelenggaraan ajang multievent olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut dijadwalkan berlangsung pada Tahun 2026. Oleh karena itu, pada tahun pelaporan ini pengukuran capaian indikator belum dapat dilakukan dan difokuskan pada penyiapan prasyarat pencapaian target RPJMN.

Secara historis, capaian Indonesia pada Asian Para Games menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan cenderung konsisten dibandingkan Asian Games. Pada Asian Para Games 2022 di Tiongkok yang dilaksanakan pada Tahun 2023, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-6. Capaian ini ditetapkan sebagai *baseline* Tahun 2024 dalam RPJMN 2025–2029, dengan mempertimbangkan bahwa hasil tersebut mencerminkan kapasitas aktual sistem pembinaan olahraga disabilitas nasional pada kondisi non-tuan rumah.

Berbeda dengan Asian Games, dinamika peringkat pada Asian Para Games sangat dipengaruhi oleh sistem klasifikasi atlet, perubahan kategori disabilitas, serta fluktuasi jumlah nomor pertandingan, yang secara langsung dapat mempengaruhi peluang perolehan medali. Oleh karena itu, penetapan target tidak semata-mata berorientasi pada ekspansi peringkat, melainkan pada konsolidasi dan penguatan kualitas prestasi.

Berdasarkan baseline tersebut, target RPJMN untuk Tahun 2026 ditetapkan pada kisaran peringkat 5–7, yang mencerminkan strategi mempertahankan daya saing pada kelompok negara unggulan Asia sekaligus membuka ruang peningkatan terbatas yang realistis. Rentang target ini dirancang untuk mengakomodasi variabilitas tinggi yang melekat pada olahraga disabilitas, termasuk potensi perubahan klasifikasi atlet, rotasi atlet unggulan, serta dinamika kebijakan internasional terkait klasifikasi dan regulasi pertandingan.

Melalui fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan manusia, Kemenko PMK mengawal agar pencapaian target peringkat Asian Para Games Tahun 2026 didukung oleh penguatan sistem pembinaan olahraga disabilitas yang adaptif dan berkelanjutan, serta selaras dengan agenda pembangunan inklusif sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029.

Tabel 16. Capaian Peringkat dan Medali Asian Paragames pada 3 Edisi

Tahun	Tuan Rumah	Target	Capaian
2014	Korea Selatan	7 emas peringkat 10 besar	9 emas, 11 perak, 18 perunggu, peringkat 9
2018	Indonesia	20 emas peringkat 10 besar	37 emas, 47 perak, 51 perunggu, peringkat 5
2022	China	peringkat 10 besar	29 emas, 30 perak, 36 perunggu, Peringkat 6

Prioritas Nasional 04 - Peringkat pada Sea Games

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian Indonesia pada ajang Sea Games menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada Sea Games 2021/2022 di Vietnam, Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga dengan perolehan 69 medali emas. Capaian ini kemudian meningkat pada Sea Games 2023 di Kamboja dengan perolehan sekitar 70–87 medali emas dan tetap mempertahankan posisi ketiga.

Pada RPJMN 2025-2029, capaian peringkat Sea Games tahun 2025 ditargetkan peringkat 3 (tiga). Kemenko PMK mengoordinasikan keikutsertaan tim Indonesia dalam mengikuti perhelatan Sea Games 2025 di Thailand terkait kesiapan keberangkatan, kesiapan atlet, kesiapan anggaran dan target capaian pada Sea Games 2025 sampai dengan koordinasi dan monitoring keikutsertaan tim Indonesia pada Sea Games Thailand 2025.

Dibandingkan dengan Sea Games 2023 di Kamboja, capaian Indonesia pada Sea Games Thailand 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada Sea Games 2023, Indonesia mengirimkan 599 atlet yang bertanding pada 31 dari 36 cabang olahraga dan menempati peringkat ketiga dengan perolehan 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 medali perunggu (total 276 medali).

Sementara itu, pada Sea Games Thailand 2025, Indonesia mengirimkan 1.021 atlet yang bertanding pada 48 dari 51 cabang olahraga dan berhasil meningkatkan posisi menjadi peringkat kedua dengan perolehan 91 medali emas, 112 medali perak, dan 130 medali perunggu (total 333 medali). Peningkatan capaian tersebut mencerminkan penguatan kebijakan pembinaan prestasi olahraga serta efektivitas dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional.

Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK akan terus memperkuat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan guna mendukung peningkatan prestasi olahraga, baik ditingkat nasional maupun internasional.

Tabel 17. Target dan Capaian Peringkat Sea Games

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Peringkat Pada Sea Games	Peringkat 3	Peringkat 2

Tabel 18. Capaian Sea Games 5 tahun terakhir

Tahun	Tuan Rumah	Emas	Perak	Perunggu	Peringkat
2017	Malaysia	38	63	90	5
2019	Filipina	72	84	111	4
2021/ 2022	Vietnam	69	92	80	3
2023	Kamboja	87	80	109	3
2025	Thailand	91	112	130	2

Prioritas Nasional 04 - Peringkat pada ASEAN Para Games

Capaian Indonesia pada Asean Para Games menunjukkan konsistensi sebagai kekuatan utama Asia Tenggara. Pada ASEAN Para Games 2022 di Solo, Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan perolehan sekitar 175 medali emas, melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan berlanjut pada Asean Para Games 2023 di Kamboja, dimana Indonesia

kembali meraih juara umum dengan sekitar 159 medali emas. Untuk Asean Para Games selanjutnya dilaksanakan di Thailand pada Januari 2026 dimana Indonesia meraih peringkat dua dengan 135 medali emas.

Secara peringkat Indonesia memang turun dari sebelumnya peringkat 1 menjadi peringkat 2 di Thailand. Namun ketercapaian tersebut tetap sesuai target sekaligus menegaskan keberhasilan pencapaian sasaran kinerja nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Lampiran III, yang menargetkan peringkat Indonesia pada ASEAN Para Games berada pada rentang peringkat 1-2. Ketercapaian target menunjukkan efektivitas sistem pembinaan atlet disabilitas, khususnya melalui peran *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia dalam regenerasi atlet, pemusatan latihan nasional, serta pemanfaatan *sport science*. Tren juara umum beruntun juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dalam olahraga disabilitas.

Meskipun demikian, tantangan tetap muncul pada level Asia dan Paralimpiade, di mana persaingan jauh lebih ketat. Oleh sebab itu, strategi peningkatan kualitas pelatihan, eksposur kompetisi internasional, serta penguatan dukungan teknologi olahraga menjadi langkah penting ke depan. Dari sisi efisiensi, keberhasilan meraih juara umum secara beruntun menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya pembinaan telah berjalan optimal. Model pembinaan yang terintegrasi antara pusat, daerah, dan komunitas olahraga disabilitas menjadi faktor kunci keberhasilan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan.

Tabel 19. Target dan Capaian Peringkat Asean Para Games

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Peringkat Pada ASEAN Para Games	Peringkat 1-2	Peringkat 2

Tabel 20. Capaian Asean Para Games 5 Tahun terakhir

Tahun	Tuan Rumah	Emas	Perak	Perunggu	Peringkat
2015	Singapura	81	74	63	2
2017	Malaysia	126	75	50	1
2022	Indonesia	175	144	106	1
2023	Kamboja	159	148	94	1
2025	Thailand	135	145	114	2

Prioritas Nasional 04 - Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Aktif Berolahraga

Kemenko PMK berperan dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga guna meningkatkan capaian indikator Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga, sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Pada tahun 2024, capaian indikator tersebut tercatat sebesar 9,04%, yang menjadi dasar evaluasi untuk penguatan intervensi kebijakan pada periode berikutnya. Untuk tahun 2025, pemerintah menetapkan target capaian pada kisaran 10,36–11,45%, sejalan dengan arah kebijakan RPJMN yang menempatkan pembudayaan olahraga masyarakat sebagai instrumen peningkatan kualitas kesehatan dan ketahanan sosial masyarakat.

Dalam rangka mencapai target tersebut, Kemenko PMK melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan antar kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan mencakup penguatan kebijakan sport for all, integrasi aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari, serta peningkatan pemanfaatan ruang publik dan fasilitas olahraga berbasis komunitas. Pendekatan ini diarahkan untuk memperluas akses dan partisipasi masyarakat terhadap aktivitas olahraga secara berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, Kemenko PMK mengoordinasikan penguatan implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) agar selaras dengan sasaran pembangunan manusia dalam RPJMN serta mendukung pencapaian visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. Pembudayaan olahraga masyarakat dipandang sebagai fondasi penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia unggul, tidak hanya dari aspek kesehatan fisik, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, dan ketahanan sosial. Melalui forum koordinasi lintas sektor dan fasilitasi sinergi pusat–daerah, Kemenko PMK mendorong konsistensi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program di seluruh wilayah.

Adapun capaian indikator tahun 2025 hingga saat ini belum diterbitkan dan masih dalam proses finalisasi, serta direncanakan akan dirilis pada Maret 2026. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, khususnya di tingkat daerah, menjadi kunci dalam mendukung pencapaian target indikator tahun 2025 sekaligus menjamin keberlanjutan kebijakan pembudayaan olahraga masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor olahraga dalam mendukung agenda

pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai prasyarat utama terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional 04 - Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam bonus demografi dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pembangunan pemuda menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi tolok ukur pembangunan pemuda yang mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan serta produktivitas pemuda, hingga kepemimpinan dan partisipasi pemuda serta inklusivitas pembangunan pemuda, yang terpotret melalui 15 indikator. Capaian IPP ini menjadi cermin kondisi pembangunan pemuda sekaligus kompas kebijakan berbasis data.

Sepanjang periode 2020–2024, capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) mengalami fluktuasi sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut menunjukkan tren penguatan fase pasca pandemi. Berdasarkan metode penghitungan lama (eksisting), IPP Nasional terakhir yang tersedia tercatat sebesar 58,33 pada tahun 2024, meningkat 2,00 poin dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 56,33, serta melampaui target akhir RPJMN 2024 sebesar 57,67. Capaian ini menunjukkan upaya kualitas pemuda yang secara konsisten dilaksanakan sebagai wujud dari komitmen pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia.

IPP dalam RPJMN 2025–2029 mengalami pembaharuan dari periode sebelumnya. Penerapan IPP dengan metode baru ini menghadirkan pembaruan yang mencakup penataan ulang domain dan indikator, sekaligus penyempurnaan metodologi dan pendekatan pengukuran melalui penyediaan data yang di disagregasi hingga tingkat kabupaten/kota. Pembaruan ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai kondisi pembangunan pemuda, serta memastikan relevansinya dengan dinamika tantangan dan kebutuhan pembangunan, baik pada kondisi saat ini maupun dalam perspektif masa depan.

Secara konseptual, IPP Metode Baru dalam RPJMN 2025–2029 mempertahankan lima domain utama yang relatif sejalan dengan metode sebelumnya, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi, serta gender. Namun demikian, penyempurnaan dilakukan melalui pendekatan untuk inklusivitas pembangunan pemuda. Perubahan indikator mencerminkan pergeseran fokus dari pengukuran berbasis akses menuju pengukuran kualitas dan hasil, antara lain melalui penguatan aspek pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pasar kerja, kualitas keterlibatan pemuda dalam kepemimpinan dan organisasi, serta kondisi

kerja yang lebih layak. Selain itu, IPP metode baru mulai secara eksplisit menangkap kondisi kelompok pemuda rentan, termasuk pemuda disabilitas dan kesenjangan partisipasi kerja antara pemuda perempuan dan laki-laki. Melalui penyempurnaan indikator IPP tersebut, diharapkan dapat memotret ketimpangan dan tantangan pembangunan pemuda secara lebih akurat, sehingga mendukung perumusan kebijakan yang lebih inklusif, terarah, dan berkelanjutan.

Pada awal RPJMN Tahun 2025–2029, capaian IPP Metode Baru sebesar 60,59 pada baseline 2023 dan meningkat menjadi 62,88 pada 2024 (masih menunggu validasi BPS), sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.3. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Metode Baru Tahun 2024 mencapai 62,88, meningkat dari 60,59 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas pembangunan pemuda secara nasional. Dari lima domain penyusun IPP, Domain Kesehatan mencatat capaian tertinggi (69,34), disusul Pendidikan dan Pelatihan (69,11). Sementara itu, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan masih menjadi yang terendah (48,24), diikuti Ketenagakerjaan Layak (63,31) serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender (64,14).

Pemerintah Indonesia menetapkan target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2025 sebesar 65,16. Berdasarkan hasil prognosis, capaian IPP diperkirakan mencapai 65,78, sehingga menunjukkan potensi untuk melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, target IPP tahun 2029 ditetapkan sebesar 73,27, yang mana pencapaiannya memerlukan konsistensi kebijakan, penguatan sinergi lintas sektor, serta penajaman intervensi pada domain IPP yang masih tertinggal agar peningkatan IPP dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata.

Program Prioritas 04.10 - Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK

Dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2025 – 2029 terdapat Program Prioritas (PP) yaitu menekankan penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi dengan sasaran terwujudnya masyarakat literat untuk meningkatkan, kreativitas, inovasi, dan daya cipta, yang diukur dengan salah satunya melalui dimensi pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yaitu Dimensi Budaya Literasi, dan ini salah satu yang menjadi tanggung Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Target yang telah ditetapkan untuk dimensi Budaya Literasi IPK Tahun 2025 sebesar 63,24. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 215/M2025 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024, capaian nilai dimensi Budaya Literasi IPK Tahun 2024 tercatat sebesar

64,40, sehingga capaian kinerja telah melampaui target, dengan selisih positif sebesar 1,16 poin atau setara 101,83% dari target.

Nilai dimensi Budaya Literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dibentuk oleh tiga indikator utama, yaitu persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, persentase penduduk yang mengakses internet, serta persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan.

Pada Tahun 2024, persentase penduduk yang membaca selain kitab suci tercatat sebesar 69,04%, menunjukkan bahwa praktik membaca telah menjadi bagian dari aktivitas keseharian mayoritas masyarakat. Selanjutnya, 78,60% penduduk tercatat mengakses internet, yang mencerminkan semakin kuatnya peran literasi digital dalam mendukung budaya literasi. Adapun persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan tercatat sebesar 24,88%, yang menunjukkan masih terbukanya ruang penguatan pada aspek pemanfaatan fasilitas literasi fisik.

Tabel 21. Capaian Nilai dimensi Budaya Literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2024

Kode	Nama Dimensi	Skor
D1	Ekonomi Budaya	31.25
D2	Pendidikan	73.41
D3	Ketahanan Sosial Budaya	75.71
D4	Warisan Budaya	54.93
D5	Ekspresi Budaya	39.85
D6	Budaya Literasi	64.40
D7	Gender	57.51
IPK Nasional		59.98

Tabel 22. Nilai Indikator Penyusun Budaya Literasi

Kode	Nama Dimensi	Skor
D6	Budaya Literasi	64.40
X6.1	persentase penduduk yang membaca selain kitab suci	53.09
X6.2	persentase penduduk yang mengakses internet	74.25
X6.3	persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat	10.92

Capaian tersebut juga mencerminkan tren peningkatan nilai dimensi Budaya Literasi yang konsisten dari tahun ke tahun. Berdasarkan data IPK nasional, nilai dimensi Budaya Literasi tercatat sebesar 54,29 pada Tahun 2021, meningkat menjadi 57,40 pada Tahun 2022, kemudian naik kembali menjadi 60,49 pada Tahun 2023, dan mencapai 64,40 pada Tahun 2024. Peningkatan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa pembangunan budaya literasi telah berjalan secara progresif dan sistematis, serta menghasilkan perbaikan capaian yang nyata setiap tahunnya.

Terpenuhinya bahkan terlampauinya target pada tahun pertama penetapan indikator ini sebagai target kinerja Unit Kerja memberikan landasan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan peningkatan nilai dimensi Budaya Literasi pada periode RPJMN 2025–2029, sekaligus mengarahkan fokus kebijakan ke depan pada peningkatan kualitas praktik literasi, pemerataan capaian antarwilayah, serta penguatan dampak literasi terhadap pembangunan manusia dan kebudayaan nasional.

Prioritas Nasional 08 - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dikembangkan sebagai indeks komposit pelengkap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur dimensi pembangunan manusia yang belum sepenuhnya tertangkap oleh IPM, khususnya dimensi sosial. Jika IPM berfokus pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, maka IPMas dirancang untuk mengukur kualitas kehidupan sosial masyarakat, termasuk kohesi sosial, inklusi sosial, serta kapasitas masyarakat sipil dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan

Pengukuran IPMas disusun secara modular dan komprehensif, mencakup 3 dimensi utama, yaitu: (1) Kohesi Sosial, (2) Inklusi Sosial, dan (3) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil, yang selanjutnya diturunkan ke dalam 12 aspek, 18 variabel, dan 28 indikator. Indikator-indikator tersebut bersumber dari beragam survei nasional, antara lain Susenas (Kor dan Modul), Sakernas, Podes, serta SPTK, yang masing-masing memiliki siklus pengumpulan data yang tidak seluruhnya tersedia setiap tahun

Kondisi tersebut menyebabkan penghitungan IPMas tidak dapat dilakukan secara tahunan sebagaimana indikator berbasis survei tunggal. Oleh karena itu, hingga Tahun 2025, penghitungan IPMas masih mengacu pada baseline nasional Tahun 2021, yang merupakan tahun terakhir dengan ketersediaan data lengkap dan konsisten lintas sumber. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, nilai IPMas Indonesia Tahun 2021 tercatat sebesar 62,85, yang mencerminkan capaian pembangunan masyarakat Indonesia pada dimensi sosial secara agregat nasional

Dengan karakteristik pengukuran tersebut, evaluasi capaian kinerja Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) pada Tahun 2025 selanjutnya dianalisis berdasarkan ketercapaian proses, penguatan fondasi kelembagaan dan metodologis, serta posisi capaian baseline nasional sebagai rujukan dalam menilai progres pencapaian sasaran strategis.

Indikator IPMas ditetapkan dengan mekanisme proses penghitungan oleh BPS. Hingga akhir Tahun 2025, realisasi IPMas masih berada pada tahap finalisasi penghitungan, seiring dengan dinamika ketersediaan dan konsolidasi data lintas survei nasional yang menjadi basis penyusunan indeks. Meskipun demikian, capaian kinerja Tahun 2025 pada IPMas adalah dengan telah tersusunnya kerangka metodologi IPMas yang disepakati lintas kementerian/lembaga, tersedianya *baseline* nasional (capaian IPMas 2021), serta progres signifikan dalam konsolidasi data untuk penghitungan periode berikutnya.

Dalam RPJMN 2025–2029, IPMas ditetapkan sebagai indikator strategis yang mendukung pencapaian pembangunan manusia Indonesia secara berkelanjutan. Hingga Tahun 2025, capaian IPMas telah berada pada jalur yang selaras dengan target RPJMN, khususnya dalam hal kesiapan metodologi, integrasi indikator lintas sektor, dan penguatan peran Kemenko PMK sebagai koordinator kebijakan.

Secara internasional, IPMas memiliki kesetaraan konseptual dengan berbagai instrumen pengukuran global yang berfokus pada kesejahteraan non-material dan modal sosial, seperti *Social Progress Index* dan *Global Soft Power Index*. Relevansi IPMas dalam peta pembangunan global terlihat dari kemampuannya untuk mengukur dimensi pembangunan manusia yang inklusif melalui tiga dimensi utama, yaitu Kohesi Sosial, Inklusi Sosial, dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil. Keberhasilan IPMas dalam mengintegrasikan aspek nilai dan karakter ini menjadikannya sebagai pelengkap strategis bagi indikator pembangunan internasional dalam menggambarkan kualitas hidup serta kemajuan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Keberhasilan utama capaian IPMas Tahun 2025 didorong oleh:

1. Penguatan koordinasi trilateral antara Kemenko PMK, Bappenas, dan BPS.
2. Konsistensi kebijakan dalam menjadikan IPMas sebagai indikator strategis nasional.
3. Integrasi IPMas dengan agenda penguatan karakter dan jati diri bangsa.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan ketersediaan data terbaru pada beberapa sumber survei nasional serta kebutuhan

normalisasi metodologi agar konsisten antar periode. Sebagai tindak lanjut, solusi yang telah dan akan dilakukan meliputi percepatan konsolidasi data, penyempurnaan metodologi penghitungan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis dashboard IPMas.

e. Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial
Prioritas Nasional 08 - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif Terhadap PDB

Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator strategis yang menggambarkan besaran dampak ekonomi langsung kejadian bencana terhadap kapasitas perekonomian nasional. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kerentanan ekonomi terhadap risiko bencana, mengevaluasi efektivitas kebijakan pengurangan risiko bencana, serta memantau ketangguhan pembangunan ekonomi nasional terhadap guncangan akibat bencana. Nilai proporsi yang semakin rendah mencerminkan menurunnya dampak ekonomi bencana terhadap PDB, sekaligus menunjukkan meningkatnya ketahanan ekonomi dan efektivitas kebijakan mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Target Indikator Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,137 persen, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menurunkan dampak ekonomi langsung bencana secara signifikan dibandingkan kapasitas perekonomian nasional. Hingga akhir Tahun 2025, realisasi indikator ini belum dapat ditetapkan karena proses penghitungan kerugian ekonomi langsung masih dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dijadwalkan selesai pada akhir Februari 2026. Dengan demikian, ketercapaian target kinerja Tahun 2025 masih bersifat tentatif dan akan ditetapkan setelah seluruh data kerugian terverifikasi dan terkonsolidasi secara nasional. Meskipun capaian numerik belum tersedia, proses pengukuran indikator telah dilaksanakan sesuai metodologi yang disepakati, sehingga pencapaian kinerja Tahun 2025 tetap berada dalam kerangka akuntabilitas dan tata kelola kinerja yang terukur.

Sebagai indikator *outcome* yang relatif baru dikembangkan secara nasional, penghitungan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB masih berada pada tahap konsolidasi metodologi. *Baseline* nasional Tahun 2024 sebesar 1,4 persen digunakan sebagai titik awal evaluasi kinerja pada periode RPJMN 2025–2029. Dibandingkan baseline tersebut, target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 0,137 persen

menunjukkan arah kebijakan yang progresif dalam menurunkan dampak ekonomi bencana secara signifikan.

Perbandingan capaian antar periode secara kuantitatif belum sepenuhnya dapat dilakukan karena keterbatasan data historis yang telah terstandarisasi. Namun demikian, tren kebijakan dan penguatan koordinasi lintas sektor menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menurunkan kerugian ekonomi akibat bencana dari tahun ke tahun melalui penguatan mitigasi struktural dan nonstruktural, peningkatan kesiapsiagaan, serta perbaikan tata kelola penanganan pascabencana.

Indikator ini secara langsung selaras dengan sasaran RPJMN 2025–2029, khususnya pada Prioritas Nasional penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup melalui pengurangan risiko bencana. Target Tahun 2025 merupakan bagian dari lintasan pencapaian jangka menengah RPJMN yang bertujuan menurunkan proporsi kerugian ekonomi bencana secara bertahap dan berkelanjutan.

Realisasi indikator hingga Tahun 2025 meskipun masih dalam proses penghitungan telah menunjukkan kesesuaian arah kebijakan dengan target RPJMN, terutama melalui integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, penguatan kebijakan lintas sektor, serta peningkatan kualitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada level global, indikator ini sejalan dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) 2015–2030, khususnya Target C, serta indikator SDGs 1.5.2 dan 11.5.2(a) yang mengukur kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB global. Pengembangan dan penerapan indikator ini menempatkan Indonesia dalam kerangka pengukuran yang sebanding dengan praktik internasional, meskipun perbandingan langsung antarnegara masih memerlukan keseragaman metodologi dan kualitas data.

Upaya penyelarasan metodologi nasional dengan standar Sendai Framework dan SDGs menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan risiko bencana dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional sesuai praktik terbaik internasional.

Belum tersedianya capaian akhir Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) disebabkan oleh kompleksitas penghitungan kerugian ekonomi langsung yang memerlukan integrasi data lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta proses verifikasi kerusakan aset publik dan privat pascabencana. Di sisi lain, kondisi ini juga mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam memastikan akurasi dan kredibilitas data sebagai dasar evaluasi kebijakan.



Tabel 23. Menko PMK Meninjau Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sumatera Utara

Kedepan, peningkatan kinerja indikator ini didorong melalui penguatan sistem pendataan kerugian bencana, penyelarasan metodologi nasional, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaporan kerusakan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat konsolidasi data. Selain itu, penguatan mitigasi risiko bencana, investasi pada infrastruktur berketahanan bencana, serta pengembangan skema pembiayaan risiko bencana menjadi alternatif solusi strategis untuk menurunkan proporsi kerugian ekonomi terhadap PDB.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Kemenko PMK memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 209.198.340.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan melalui unit-unit kerja terkait serta dukungan manajemen internal. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Pada tabel dibawah ini merupakan rincian realisasi anggaran Kemenko PMK yang tercatat sebesar Rp. 174.190.081.455,00 atau 86,98% dari total pagu, sisa anggaran yang masih tersedia merupakan hasil dari upaya efisiensi, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, serta anggaran yang terblokir, yang dilakukan tanpa mengurangi kualitas output maupun capaian sasaran program yang telah ditetapkan. Pagu anggaran Kemenko PMK Tahun 2025 yang terblokir sebesar Rp 29.357.356.000 atau sebesar 14% dari pagu awal, sehingga didapatkan pagu efektif sebesar Rp. 179.840.984.000. Berdasarkan pagu efektif, Kemenko PMK telah menyerap anggaran sebesar 96,86%.

Tabel 24. Realisasi Anggaran Kemenko PMK Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu Awal [Rp]	Pagu Efektif [Rp]	Realisasi [Rp]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Koordinasi Kualitas Keluarga dan Kependudukan	5.382.470.000	3.364.366.000	3.348.863.882	62,22	99,54
2	Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	4.331.764.000	3.112.679.000	3.097.701.835	71,51	99,52
3	Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	4.780.949.000	2.470.221.000	2.439.095.567	51,02	98,74
4	Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	4.565.671.000	2.706.284.000	2.690.337.539	58,93	99,41
5	Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	4.372.412.000	2.393.297.000	2.388.006.009	54,62	99,78
6	Koordinasi Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	5.215.974.000	3.190.968.000	3.181.468.894	60,99	99,70
7	Dukungan Manajemen Internal Kemenko PMK	180.549.100.000	162.603.169.000	157.044.607.729	86,98	96,58
Total		209.198.340.000	179.840.984.000	174.190.081.455	83,27	96,86

Berdasarkan realisasi per kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh unit kerja dapat berjalan dengan baik. Perbedaan antara pagu dan realisasi anggaran pada beberapa unit menunjukkan adanya pengendalian belanja yang lebih cermat, penyesuaian kebutuhan sesuai dengan kondisi aktual, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Kemenko PMK. Ditinjau dari jenis belanja, realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal juga mencerminkan penerapan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi tersebut antara lain dilakukan melalui pengendalian biaya operasional, optimalisasi penggunaan fasilitas yang telah tersedia, serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan agar lebih tepat guna dan berorientasi pada hasil.

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	TA 2024			TA 2025		
	Pagu [Rp*]	Realisasi [Rp*]	[%]	Pagu [Rp*]	Realisasi [Rp*]	[%]
Belanja Pegawai	79.934.794	76.870.781	96,16	85.376.748	80.339.481	94,10
Belanja Barang	200.350.020	186.301.309	93,01	122.021.592	92.144.725	75,52
Belanja Modal	6.451.367	6.241.687	96,75	1.800.000	1.705.874	94,77
Total	286.736.181	269.413.778	93,96	209.198.340	174.190.081	83,27

(*dalam ribu rupiah)

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025 berdasarkan Pagu Awal dan Pagu Efektif Tahun Berjalan

Komponen	Tahun 2024	Tahun 2025
Pagu Awal [Rp]	286.736.181.000	209.198.340.000
Pagu Efektif [Rp]	277.526.586.000	179.840.984.000
Realisasi [Rp]	269.413.778.899	174.190.081.455
% Capaian Pagu Awal	93,96%	83,27%
% Capaian Pagu Efektif	97,08%	96,86%

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat selisih persentase yang cukup signifikan dikarenakan adanya kebijakan anggaran terblokir pada tahun berjalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai bagian dari strategi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Langkah ini diambil oleh Kemenko PMK untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap sasaran strategis tugas dan fungsi SKP Kemenko PMK. Meskipun terdapat penyesuaian tersebut, Kemenko PMK mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya anggaran yang tersedia guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Kebijakan pemblokiran yang diterapkan sebagai langkah efisiensi dan pengendalian kualitas belanja, turut menjadi faktor yang menyebabkan pencapaian beberapa indikator kinerja belum mencapai titik optimal yang diharapkan. Pembatasan akses terhadap sebagian alokasi dana tersebut membatasi akselerasi kegiatan strategis yang membutuhkan dukungan finansial penuh, sehingga laju peningkatan indikator masih bersifat inkremental dan memerlukan penguatan intervensi lebih lanjut.

Meskipun menghadapi tantangan ketersediaan anggaran yang tidak menyeluruh, Kemenko PMK tetap mampu menjaga keberlangsungan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian. Kemenko PMK memandang bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan di tengah kebijakan blokir anggaran ini merupakan bukti dari manajerial yang akuntabel dalam memprioritaskan program-program berdampak tinggi. Ke depan, Kemenko PMK berkomitmen untuk terus melakukan advokasi terhadap pembukaan blokir pada kegiatan-kegiatan prioritas nasional guna memastikan bahwa ketersediaan sumber daya finansial selaras dengan kebutuhan akselerasi target pembangunan manusia dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Kinerja Kemenko PMK pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat positif dan akuntabel. Dari satu sasaran strategis yang ditetapkan, Kemenko PMK berhasil mengawal tiga indikator utama dengan hasil sebagai berikut:

- a. **IKSS 1 - Indeks Modal Manusia (IMM):** Masih dalam tahap penghitungan oleh BPS dan Bappenas, namun koordinasi komponen penyusunnya seperti Stunting dan Harapan Lama Sekolah menunjukkan tren yang searah dengan target.
- b. **IKSS 2 - Indeks Kinerja SKP PMK:** Mencapai nilai **94,78**, melampaui target 80 dengan kategori "**Sangat Baik**".
- c. **IKSS 3 - IKPK PMK:** Mencapai nilai **Sangat Baik**, melampaui target Baik, dengan capaian 5,387

Tingkat penyerapan anggaran yang mencapai 96,86% berdasarkan pagu efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya finansial dilakukan secara efektif dan efisien untuk membiayai transformasi manajerial dan penguatan tata kelola Kemenko PMK dalam menjalankan tugas dan fungsi SKP. Kemenko PMK berhasil membuktikan bahwa alokasi anggaran yang tersedia mampu menghasilkan output kebijakan yang berkualitas. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang masih memerlukan optimalisasi. Adanya kebijakan pemblokiran anggaran tahun 2025 menjadi faktor yang menyebabkan pencapaian beberapa indikator strategis belum mencapai titik optimal sebagaimana yang telah direncanakan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Kemenko PMK Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang menjadi saran dan rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. **Optimalisasi anggaran prioritas**, diperlukan langkah advokasi yang lebih intensif bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas optimalisasi pagu anggaran efektif pada kegiatan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sebagai bentuk akselerasi indikator strategis, guna memastikan ketersediaan sumber daya finansial yang selaras dengan target pembangunan nasional;
2. **Penguatan sistem data terintegrasi**, diperlukan sistem monitoring berkala berbasis data rutin melalui integrasi digital lintas sektor untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

